



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	54
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>56</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	56
3.1.1 Permasalahan Sekretariat .....	56
3.1.2 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan .....	56
3.1.3 Permasalahan Bidang Prasarana .....	57
3.1.4 Permasalahan Bidang Keselamatan .....	58
3.1.5 Permasalahan Bidang Angkutan .....	59
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	60
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi.....	62
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan .....	62
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.....	71



3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	73
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	134
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>105</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan..	105
4.1.1	Tujuan Dinas Perhubungan .....	106
4.1.2	Sasaran Dinas Perhubungan.....	106
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>108</b>
5.1	Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan.....	108
5.1.1	Strategi Dinas Perhubungan.....	108
5.1.2	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan .....	110
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>112</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>128</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>130</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jabatan Struktural dan Fungsional.....	29
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	30
Tabel 2.3	Pegawai Tidak Tetap Harian dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan .....	30
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	31
Tabel 2.5	Aset Dinas Perhubungan.....	32
Tabel 2.6	Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan.....	33
Tabel 2.7	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda.....	33
Tabel 2.8	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan .....	34



Tabel 2.9	Data Pengelolaan Terminal .....	34
Tabel 2.10	Jumlah Angkutan yang Melayani Kota Samarinda.....	34
Tabel 2.11	Jumlah Penumpang yang Terlayani oleh Angkutan Umum .....	35
Tabel 2.12	Jumlah Kapal dan Jenis Operasi .....	36
Tabel 2.13	Data Bongkar atau Muat Dermaga .....	36
Tabel 2.14	Jembatan Penyeberangan Orang.....	37
Tabel 2.15	Titik Kemacetan Kota Samarinda .....	39
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	43
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	46
Tabel 3.1	Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda .....	74
Tabel 3.2	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Samarinda.....	78
Tabel 3.3	Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan RTRW.....	81
Tabel 3.4	Potensi Pengembangan Kota Samarinda .....	91
Tabel 3.5	Indikasi Program RTRW Kota Samarinda .....	95
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan ....	107
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Dinas Perhubungan.....	111
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan	113
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kondisi Pada Akhir RPJMD .....	129

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda	7
Gambar	2.2	Peta Jaringan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS).....	40
Gambar	3.1	Peta Struktur Ruang Kota Samarinda .....	94



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian unsur Pemerintahan yang menjadi unsur kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi antara lain adalah Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis, dibidang Lalu Lintas Jalan, dibidang Prasarana, dibidang Keselamatan, dibidang Angkutan, dan penyelenggara urusan Kesekretariatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah kota harus mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Pusat dan Provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah kota pada saat pergantian Kepala Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka



pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundangan dan peraturan daerah tentang tugas pokok dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang berkaitan dengan bidang Perhubungan. Perubahan Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang Visi Pemerintah Kota Samarinda 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa Misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai pembentukan tim Penyusun Renstra PD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra PD, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra PD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai Sekretaris Tim, Kasubbag Program sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sekretariat.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota tim untuk persamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : Peraturan perUndang-Undangan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang meliputi Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota



Samarinda, dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Adapun agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan Perubahan Renstra, penyusunan rancangan Perubahan Renstra, penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra, penetapan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu dikumpulkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Samarinda, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda periode lalu. Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan



Kota Samarinda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

## **1.2 Landasan Hukum**

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Renstra Strategis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034;
- 7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- 9) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
- 10) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dan tolak ukur bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan di Kota Samarinda.

Adapun tujuan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu :



1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai,
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal,
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan perhubungan tahunan,
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I      Pendahuluan;**

**BAB II     Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan;**

**BAB III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan;**

**BAB IV     Tujuan dan Sasaran;**

**BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan;**

**BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;**

**BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;**

**BAB VIII  Penutup.**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

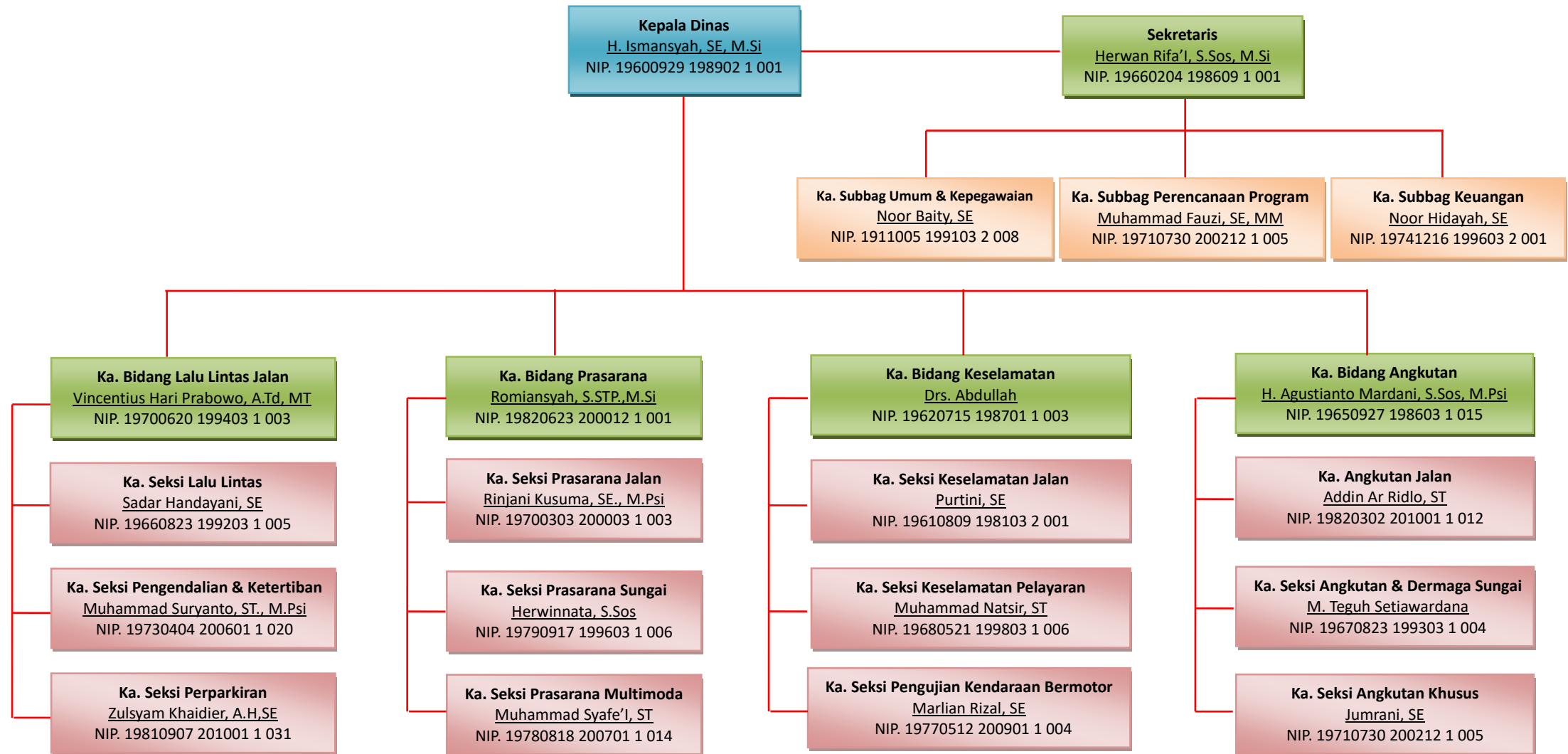
#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda tentang, susunan organisasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
  - a. Seksi Lalu Lintas
  - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
  - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Prasarana membawahkan :
  - a. Seksi Prasarana Jalan
  - b. Seksi Prasarana Sungai
  - c. Seksi Prasarana Multimoda
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
  - a. Seksi Keselamatan Jalan
  - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
  - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Bidang Angkutan membawahkan :
  - a. Seksi Angkutan Jalan
  - b. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
  - c. Seksi Angkutan Khusus



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda





Daerah adalah Kota Samarinda, Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda. Walikota adalah Walikota Samarinda, Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan merupakan unsur staf yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan. Bidang/Seksi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah. Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah tugas dan fungsi dari setiap unsur / unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda, adapun uraian tugas dan fungsi pejabat adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;



- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

## 2) Sekretariat Dinas Perhubungan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat / pelanggan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. Adapun Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  - b. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - e. Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
  - f. Mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - g. Mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
  - h. Menyusun laporan tahunan Dinas;



- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - j. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - k. Membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - c. Memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan verifikasi SPP;
  - e. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
  - g. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
  - h. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - i. Menyusun neraca keuangan Dinas;
  - j. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
  - k. Menyusun laporan keuangan Dinas;
  - l. Membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
  - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - f. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
  - g. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas,
  - h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
  - i. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  - j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
  - k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  - l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - m. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
  - n. Menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
  - o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - p. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - q. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3) Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Lalu Lintas Jalan. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalulintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
- g. Penyiapan dan pelaksana koordinator Forum Lalulintas.
- h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
- i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas





- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan raya kota;
  - c. Menyusun jaringan jalan kota yang disesuaikan dengan tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional;
  - d. Memberikan advis teknis rencana pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  - e. Memberikan advis lalulintas sebagai syarat penerbitan IMB/SITU/SIUP terhadap rencana bangunan khusus;
  - f. Menyusun dan menetapkan kelas pada jaringan jalan wilayah kota serta penilaian kinerja jalan;
  - g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan dalam wilayah kota;
  - h. Melaksanakan dan mengoperasikan *Area Traffic Control System* (ATCS) serta pengaturan siklus dan waktu APILL;
  - i. Pelaksanaan koordinator Forum Lalulintas dan lomba tertib lalulintas.
  - j. Mengkaji dan menganalisa Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) melalui tim penilai sebagai dasar penerbitan persetujuan doukumen ANDALALIN;
  - k. Menyusun pertimbangan teknis analisis dampak lalu lintas;
  - l. Memberikan advis/pertimbangan teknis manajemen rekayasa dan pengendalian dampak lalulintas kepada Institusi Polri terkait permohonan ijin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalulintas di jalan wilayah kota;
  - m. Menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan wilayah kota;



- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Merumuskan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan (LLJ);
  - c. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang lalu lintas jalan;
  - d. Melakukan koordinasi dengan PPNS terhadap pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan perundangan bidang lalu lintas jalan;
  - e. Pemeriksaan dokumen teknis laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
  - f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
  - g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa pelanggaran lalulintas jalan;
  - h. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan raya dalam wilayah Daerah;
  - i. Melakukan tugas-tugas pengawalan sesuai peraturan perundangan dalam rangka kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan;
  - j. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi penderekan yang dilaksanakan mobil derek Dinas;
  - k. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait yang menangani pengendalian dan ketertiban di jalan;
  - l. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penertiban;
  - m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;



- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan operasional fasilitas parkir;
  - c. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir;
  - d. Menetapkan kantong parkir dan ruas jalan yang dapat dijadikan tempat parkir;
  - e. Mengendalikan ruas jalan terhadap kegiatan parkir yang tidak pada tempatnya;
  - f. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
  - g. Menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran;
  - h. Pengaturan fasilitas perparkiran;
  - i. Membina terhadap pihak penyelenggara parkir baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta;
  - j. Melaksanakan pembinaan, arahan dan penyuluhan terhadap juru parkir;
  - k. Menyediakan sistem data dan informasi perparkiran;
  - l. Penentuan besaran retribusi parkir dan memungut retribusi parkir dari pihak penyelenggara;
  - m. Menghitung data potensi dalam rangka penyusunan rencana target retribusi parkir;
  - n. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan perparkiran;
  - o. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya
- 4) Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan



pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan. Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C;
- i. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksana sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Prasarana membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

1. Seksi Prasarana Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- d. Menetapkan lokasi terminal penumpang tipe c;
- e. Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- f. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe c;
- g. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi terminal tipe c;
- h. Melaksanakan kegiatan pengoperasian terminal angkutan barang;
- i. Menyusun perencanaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, serta lampu penerangan jalan umum, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan;
- j. Menetapkan titik lokasi fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- l. Menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa terminal, halte, alat pemberi isyarat lalu lintas,



- rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Prasarana Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Prasarana Sungai;
  - c. Melaksanakan kebijakan operasional di Prasarana Sungai;
  - d. Melaksanakan penyiapan penetapan kebijakan tatanan pelabuhan dan dermaga;
  - e. Melaksanakan penyiapan pengelolaan pelabuhan/dermaga;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan dan dermaga yang dikelola oleh dinas;
  - g. Melaksanakan kegiatan pembersihan alur pelayaran angkutan sungai;
  - h. Melaksanakan kegiatan pengerukan pada kolam pelabuhan dan dermaga sungai;
  - i. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pada area logpond, keramba dan usaha perhubungan yang mengganggu alur pelayaran;
  - j. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum sungai;
  - k. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus sungai;
  - l. Menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan sungai;
  - m. Melaksanakan pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus sungai;
  - n. Menetapkan izin terminal khusus sungai yang dikelola oleh swasta;
  - o. Memberikan rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan sungai yang terletak pada jaringan kota;



- p. Melaksanakan pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan rambu sungai, dermaga, navigasi alur pelayaran dan prasarana lainnya;
  - q. Memberikan izin logpond;
  - r. Memberikan izin usaha pemeliharaan dan perawatan kapal di perairan sungai;
  - s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - t. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Prasarana Multimoda mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana multimoda;
  - c. Menetapkan rencana induk perkeretaapian wilayah kota;
  - d. Menerbitkan izin usaha, izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
  - e. Menetapkan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kota;
  - f. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
  - g. Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kota;
  - h. Menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian kota;
  - i. Menetapkan rencana induk jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat wilayah kota;
  - j. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;
  - k. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;



- l. Menyiapkan perumusan, perencanaan dan penetapan aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- m. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- n. Memberikan advis teknis penetapan lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kapal type laut yang beroperasi di perairan sungai;
- o. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- p. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional pelabuhan laut dan terminal;
- q. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional bandar udara;
- r. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, sepeda, pejalan kaki dan moda lainnya;
- s. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan prasarana yang akan dibangun oleh pihak swasta;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### 5) Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan. Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;





- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Keselamatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Keselamatan membawahi :

1. Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
  - c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;



- d. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
  - e. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota;
  - f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota;
  - g. Melaksanakan audit terhadap ruas jalan, persimpangan dan seluruh hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
  - h. Melaksanakan inspeksi keselamatan di jalan dalam kota;
  - i. Menentukan lokasi letak rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, halte dan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan raya berkaitan dengan keselamatan jalan dalam wilayah kota;
  - j. Memberikan rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  - k. Memberikan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  - l. Melaksanakan penyuluhan lalu lintas terhadap seluruh pengguna jalan dalam kota;
  - m. Melaksanakan kegiatan pemilihan sopir teladan, pelajar tertib lalulinta;
  - n. Melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan melalui promosi dan kerjasama pihak ketiga/swasta;
  - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - p. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan pelayaran;



- c. Melaksanakan perencanaan dan koordinasi kegiatan operasional sarana sungai;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian untuk menunjang keselamatan kapal, lalulintas sungai dan pelayaran;
- e. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan dokumen kapal;
- f. Melaksanakan pengukuran kapal sungai;
- g. Melaksanakan registrasi kapal sungai;
- h. Melaksanakan pemberian sertifikat kelaikan kapal sungai;
- i. Melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal dan perlengkapannya serta pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Nakhoda/Motoris (NM);
- j. Merencanakan kapal kerja perhubungan;
- k. Pemberian penilaian teknis kondisi kapal;
- l. Menyusun tata cara berlalulintas di perairan sungai;
- m. Melaksanakan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- n. Menyusun database sarana kapal-kapal sungai;
- o. Melaksanakan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penerbitan pas perairan daratan;
- p. Melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal sungai Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- q. Melakukan pungutan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor di atas air yang berkaitan dengan kelaikan kapal;
- r. Menerbitkan Surat Keterangan Radio Kapal Sungai;
- s. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan pelayaran;
- t. Melaksanakan audit dan inspeksi terhadap keselamatan pelayaran dan kecelakaan kapal;
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- w. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.



3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - c. Menetapkan rencana kerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasisonal pengujian kendaraan bermotor;
  - e. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
  - g. Melakukan pemugutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
  - h. Melakukan pemberian penilaian teknis kondisi kendaraan;
  - i. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
  - j. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - k. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan pengujian kendaraan bermotor;
  - l. Menginvestasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan.



Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemadu moda;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Angkutan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Angkutan membawahi :

1. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan jalan;
  - c. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan orang perkotaan;



- d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
  - e. Memberikan izin trayek angkutan kota;
  - f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota;
  - g. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota;
  - h. Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa/rental;
  - i. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata;
  - j. Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota;
  - k. Memberikan kartu pengawasan izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
  - l. Menyusun database angkutan jalan dalam kota;
  - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan kondisi fisik angkutan jalan dalam kota;
  - n. Menyediakan angkutan umum dan pemuatan moda;
  - o. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan jalan;
  - p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Angkutan dan Dermaga Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan dan dermaga sungai;
  - c. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kapal untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
  - d. Memberikan izin trayek kapal angkutan kota;
  - e. Melaksanakan penertiban ijin trayek kapal dalam wilayah kota;
  - f. Memberikan izin usaha angkutan sungai;



- g. Menetapkan lintasan penyeberangan dalam wilayah kota;
  - h. Menetapkan tarif ekonomi kapal angkutan kota;
  - i. Melaksanakan pengoperasian dermaga;
  - j. Menetapkan Sistem Operasional Prosedur Dermaga;
  - k. Menetapkan tarif jasa pelabuhan, pungutan sera penyeteroran retribusi dermaga;
  - l. Membuat laporan kepadatan bongkar muat penumpang dan atau barang di dermaga;
  - m. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap kapal – kapal angkutan terhadap dokumen kapal;
  - n. Menerbitkan manifest dan pas pemberangkatan kapal;
  - o. Melaksanakan pemberangkatan kapal di dermaga sungai;
  - p. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan sungai;
  - q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - r. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - s. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan khusus;
  - c. Menerbitkan izin usaha angkutan barang, angkutan BBM, Angkutan Barang Berbahaya dan Limbah, Angkutan alat berat dan angkutan hewan serta angkutan khusus lainnya;
  - d. Menetapkan jaringan lintas angkutan barang dan angkutan khusus lainnya;
  - e. Menetapkan standar pelayanan angkutan khusus yang beroperasi dalam wilayah kota;



- f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengemudi angkutan khusus dalam wilayah kota;
- g. Menetapkan tata cara pemuatan angkutan khusus yang membawa muatan dalam operasi kota;
- h. Mengolah data dan informasi sesuai lingkup tugasnya di bidang angkutan khusus;
- i. Memonitoring dan evaluasi serta pelaporan operasional angkutan khusus;
- j. Melaksanakan pemantauan terhadap angkutan khusus yang masuk dalam wilayah kota dengan membuat dan menyusun laporan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan / perlengkapan / aset. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2012-2017**

NO	Jabatan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Eselon III	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0
3	Eselon IV	21	3	21	3	21	3	21	3	21	3	13	3
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
<b>Total</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>21</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017





**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2013-2017**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	5	0	5	0	6	0	3	0	3	
2	SMP	8	0	8	0	2	0	3	0	3	
3	SMA / SMK	91	24	88	23	105	18	90	19	61	11
4	Sarjana Muda ( D-III )	5	2	5	2	5	0	9	1	7	2
5	Sarjana ( S1/D-IV )	28	12	25	9	27	15	26	12	23	11
6	Pasca Sarjana ( S2 )	11	0	11	0	12	0	19	0	8	1
<b>Jumlah</b>		<b>148</b>	<b>38</b>	<b>142</b>	<b>34</b>	<b>157</b>	<b>33</b>	<b>145</b>	<b>32</b>	<b>105</b>	<b>25</b>
<b>Total</b>		<b>186</b>		<b>176</b>		<b>190</b>		<b>177</b>		<b>130</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017

**Tabel 2.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2015-2017**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	65	5	67	3	64	4
2	SMP	0	2	18	2	16	3
3	SMA / SMK	144	18	196	17	171	19
4	Sarjana Muda ( D-III )	12	0	12	2	8	1
5	Sarjana ( S1/D-IV )	37	12	49	16	39	12
<b>Jumlah</b>		<b>258</b>	<b>37</b>	<b>342</b>	<b>40</b>	<b>298</b>	<b>39</b>
<b>Total</b>		<b>295</b>		<b>382</b>		<b>337</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017



**Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2012 - 2017**

No	Pangkat dan Golongan		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	I/a	Juru Muda	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3	I/c	Juru	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	2	0	3	0	3	0	2	0	0	0	3	0
5	II/a	Pengatur Muda	17	8	11	3	11	3	25	3	26	3	2	0
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	44	10	48	10	46	10	42	9	18	3	3	4
7	II/c	Pengatur	8	1	9	0	9	0	12	1	39	6	35	3
8	II/d	Pengatur Tk. I	11	2	8	1	8	1	7	0	8	0	7	0
9	III/a	Penata Muda	11	5	9	7	9	7	9	6	10	2	5	0
10	III/b	Penata Muda Tk. I	32	8	27	10	21	8	33	8	22	8	3	8
11	III/c	Penata	8	0	7	2	7	2	5	3	7	4	1	2
12	III/d	Penata Tk. I	13	3	11	13	11	13	10	3	7	3	2	5
13	IV/a	Pembina	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
16	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>154</b>	<b>37</b>	<b>140</b>	<b>46</b>	<b>132</b>	<b>44</b>	<b>157</b>	<b>33</b>	<b>148</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>			<b>191</b>		<b>186</b>		<b>176</b>		<b>190</b>		<b>177</b>		<b>130</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017



### A. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.

Tabel 2.5 Aset Dinas Perhubungan Tahun Per 31 Desember 2013 - 2015

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2013		Keadaan Per 31 Des 2014		Keadaan Per 31 Des 2015
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)	Harga (ribuan)
1	Tanah	14	119.810.549.004,00	14	119.810.549.004,00	144.292.469.000,00
2	Alat-alat besar	1	969.700.000,00	2	3.721.124.600,00	3.721.124.600,00
3	Alat-alat Angkutan	63	6.921.489.210,00	64	6.931.356.210,00	7.340.032.010,00
4	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	30	4.816.777.900,00	30	4.816.777.900,00	4.830.747.900,00
5	Alat kantor dan rumah tangga	678	7.866.063.218,00	706	9.146.471.618,00	10.239.008.118,00
6	Alat studio dan alat komunikasi	279	1.048.062.379,00	292	2.034.056.879,00	1.875.871.240,00
7	Alat-alat kedokteran	1	5.979.000,00	1	5.979.000,00	45.879.000,00
8	Alat Laboratorium	86	1.332.508.550,00	86	1332.508.550,00	901.754.550,00
9	Bangunan Gedung	31	28.015.864.000,00	58	32.116.734.000,00	36.666.231.000,00
10	Monumen	0	0	1	287.614.000,00	1.125.139.000,00
11	Jalan dan Jembatan	22	23.057.841.550,00	22	23.057.841.550,00	23.057.841.550,00
12	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0	44.825.000,00
13	Instalasi	12	6.871.898.450,00	12	6.871.898.450,00	6.871.898.450,00
14	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	8	418.302.000,00	8	418.302.000,00	418.302.000,00
15	Aset Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	1.391.675.439,00
16	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	577.705.400,00
17	Konstruksi dalam pengerjaan	18	129.565.010.598,00	18	129.565.010.598,00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.243</b>	<b>330.700.045.859,00</b>	<b>1.314</b>	<b>340.16.224.359,00</b>	<b>380.996.134.016,00</b>

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

**Tabel 2.6 Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2013-2016**

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Keterangan
Mobil Operasional	9	9	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	2	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	1	2	2	2	Kondisi Baik
Mobil Dinas	10	10	12	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	14	14	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	31	Kondisi Baik
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>Unit</b>

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

### B. Keadaan Umum Wilayah

**Tabel 2.7 Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda Tahun 2009-2014**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi Baik	327,09	420,64	430,00	450,50	351,89	159,63
2	Kondisi Sedang	199,34	114,39	102,90	81,25	444,79	247,34
3	Kondisi Rusak	9,90	144,55	180,60	184,15	74,55	152,07
4	Jalan Secara Keseluruhan (nasional, provinsi, dan kota)	704,62	847,78	880,61	883,99	871,34	651,342

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.8, terlihat bahwa dari tahun 2009 hingga 2012, panjang jalan keseluruhan Nasional, Provinsi, dan Kota mengalami peningkatan panjang jalan hingga mencapai 883,99 km pada tahun 2012. Namun pada tahun-tahun berikutnya, panjang jalan menurun hingga mencapai 651,342 km pada tahun 2014.

Hal yang perlu dicermati lebih lanjut berkenaan dengan data diatas adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah jalan dengan kondisi rusak dan penurunan jumlah jalan dengan kondisi jalan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak ada pemeliharaan jalan yang baik, sehingga kondisi jalan yang sebelumnya baik dapat menjadi rusak dan sedang.

Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kewenangan jalan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dilihat dari tabel 2.9, jalan Nasional mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 54,740 km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.



**Tabel 2.8 Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan Tahun 2011 - 2014**

No	Jenis Jalan	Panjang (km)			
		2011	2012	2013	2014
1	Jalan Nasional	52,38	53,36	43,00	54,740
2	Jalan Provinsi	114,73	114,73	114,73	3,100
3	Jalan Kota	713,50	715,90	713,50	593,502
<b>Jumlah</b>		<b>880,63</b>	<b>883,99</b>	<b>871,23</b>	<b>651,342</b>

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2015

**1. Kondisi Angkutan Jalan dan Terminal**

Fasilitas lalu lintas berupa simpul lalu lintas dalam bentuk Sub Terminal pelayanan angkutan umum dalam kota adalah :

1. Sub Terminal Pasar Pagi
2. Sub Terminal Pasar Segiri
3. Sub Terminal Sambutan
4. Sub Terminal Pal Lima Suryanata

**Tabel 2.9 Data Pengelolaan Terminal Tahun 2013-2015**

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
<b>Data Pengelolaan Terminal</b>	4	4	4	Type Terminal Kelas C
				<b>Jumlah Penumpang</b>
	21.325	23.426	27.575	Tiba
	40.121	43.440	46.958	Berangkat
	1	1	1	Terminal Angkutan Barang (belum di Operasikan)

Sumber : Database UPT. Terminal Dishub Kota Samarinda, Tahun 2015

**Tabel 2.10 Jumlah Angkutan yang melayani Kota Samarinda Tahun 2016**

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KENDARAAN
1	Angkot dalam Kota	1524 Kendaraan / 19 Trayek
2	Taxi Argometer dalam Kota	42 Kendaraan
3	Angkutan Pelajar	- Kendaraan
4	Angkutan Barang	117 Perusahaan 651 Kendaraan
<b>Total</b>		2.561 Kendaraan berdasarkan domisili

Sumber : Database Seksi Angkutan Bidang LLAJ, Tahun 2016



**Tabel 2.11 Jumlah Penumpang yang terlayani oleh Angkutan Umum Tahun 2010-2015**

Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Load Factor (LF)	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736
Jumlah orang yang melalui Terminal	1.582.328	1.183.544	983.628	857.432	733.058	663.812
<b>Total</b>	<b>5.696.064</b>	<b>5.297.280</b>	<b>5.097.364</b>	<b>4.971.168</b>	<b>4.846.794</b>	<b>4.777.548</b>

Sumber : Database Seksi Angkutan Bidang LLAJ, Tahun 2015

## **2. Kondisi Sungai**

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Panjang sungai Mahakam yang berada di wilayah Pemerintah Kota Samarinda 34 Kilometer. Mulai dari batas Loa Janan sampai Palaran Sungai Meriam dengan lebar sungai berkisar 300-500 meter serta kedalaman berkisar 30 meter.

## **3. Kondisi Dermaga di Kota Samarinda**

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Dermaga yang ada di wilayah Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) unit terdiri dari :

1. Dermaga Mahakam Hilir
2. Dermaga Mahakam Hulu
3. Dermaga Samarinda Seberang
4. Dermaga Harapan Baru
5. Dermaga Loa Janan

Dermaga tersebut berpotensi melayani angkutan antar daerah dan dalam wilayah Kota Samarinda, serta dapat menjadi sumber PAD terutama untuk retribusi tambat, parkir kapal dan retribusi masuk. Untuk jumlah kapal dan jenis operasi dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 berikut :



Tabel 2.12 Jumlah Kapal dan Jenis operasi Tahun 2016

Jenis Kapal Beroperasi	Tujuan	Jumlah Kapal
Kapal Muatan	Samarinda – Muara Wahau	9 Kapal
	Samarinda – Long Iram	5 Kapal
	Samarinda – Melak	8 Kapal
	Samarinda – Long Tesak	4 Kapal
	Samarinda – Long Bagun	15 Kapal
	Samarinda – Long Tabang	23 Kapal
	Samarinda – Damai	3 Kapal
Kapal Barang	Luar dan Dalam Kota Samarinda	40 Kapal
<b>Total</b>		<b>107 Kapal</b>

Sumber : Database Bidang LLAS Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Tabel 2.13 Data Bongkar atau Muat Dermaga Tahun 2013 - 2016

Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		KET
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	
Bongkar Muat Penumpang dan Barang	42.922	42.870	8.377	7.362	37.516	37.487	105.740	130.096	Orang
	9.244	13.056	3.530	1.714	7.234	14.160	18.485	25.600	Barang
	1.719	5.369	417	180	1.583	3.360	848	1.397	Sepeda Motor
<b>Jumlah</b>	<b>53.885</b>	<b>61.295</b>	<b>12.324</b>	<b>9.256</b>	<b>46.333</b>	<b>55.007</b>	<b>125.073</b>	<b>157.093</b>	<b>Unit</b>

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2015

#### 4. Penggunaan Alur Sungai

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di sungai. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke pelabuhan, oleh karena itu harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat. Petugas pelabuhan berkewajiban untuk melakukan



perawatan terhadap alur pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai.

Pada umumnya alur sungai berfungsi sebagai alur pelayaran bagi kapal-kapal, penimbunan kayu (*log pond*), jaring keramba dan doking kapal tepi sungai supaya tidak mengganggu alur pelayaran pengguna sungai lainnya. Selain berfungsi sebagai alur sungai, juga berpotensi dalam peningkatan PAD, seperti :

1. Pas Kapal Pendalaman Perairan Daratan;
2. Pembuatan Tanda Selar Kapal.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4. Pembuatan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau
5. Pembuatan Surat Ukur Kapal
6. Pas Kapal Pendalaman Perairan Daratan
7. Pembuatan Tanda Selar Kapal
8. Ijin trayek

#### **5. Fasilitas Pejalan Kaki**

Fasilitas Pejalan kaki untuk menyeberang jalan dalam bentuk jembatan penyeberangan terdapat 4 (empat) titik lokasi sebagaimana tergambar dalam tabel 2.15 berikut ini :

**Tabel 2.14 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)**

No	Lokasi	Volume	Kondisi
1	Jl. Ir. H. Juanda	1	Baik
2	Jl. Letd. S. Parman	1	Baik
3	Jl. Gajah Mada	1	Baik
4	Jl. Slamet Riyadi	1	Baik
<b>Jumlah</b>		4	Baik

Sumber : Database Seksi Lalu lintas Bidang LLAJ, Tahun 2016

Salah satu fasilitas pejalan kaki yang tidak kalah penting adalah Zona Selamat Sekolah (ZOSS). ZOSS merupakan hasil kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam suatu ruas jalan area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi. Sekolah sebagaimana dimaksud adalah PAUD, TK, SD / MI, SMP / MTS dan SMA / SMK / MA. Logikanya, anak-anak pada tingkat sekolah tersebut masih belum bisa





dikategorikan mandiri secara 100% maka dengan adanya ZOSS melindungi mereka ketika ingin menyeberang jalan menuju sekolah dan sebaliknya.

ZOSS dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari :

- Marka jalan, terbagi menjadi beberapa warna yakni :
  1. Marka berwarna putih;
  2. Marka berwarna kuning; dan
  3. Marka berwarna merah;
- Rambu lalu lintas.

Penerapan ZOSS merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap ketertiban lalu lintas dan pendidikan. Melalui adanya ZOSS akan mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di saat jam berangkat ke sekolah dan pulang ke sekolah. Harapan pemerintah dengan adanya ZOSS ini agar para pengguna jalan mengurangi kecepatan kendaraan saat melewati area ZOSS tersebut. Fenomena yang sering terjadi para pengguna jalan masih ada yang sering melanggar seperti melewati ruas jalan di sebelahnya agar tidak melewati pita penghadang di area ZOSS. Untuk di Kota Samarinda penerapan ZOSS masih sangat kurang dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang mengalami defisit anggaran, dari tahun 2010 sampai dengan 2016 usulan dari Dinas Perhubungan mengenai ZOSS dapat diakomodir pada tahun 2014 dan berjumlah 3 (tiga) titik di jalan Kota Samarinda data ini bersumber dari database Seksi Lalu lintas Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

## **6. Kemacetan di Kota Samarinda**

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, adapun titik kemacetan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut :



**Tabel 2.15 Titik Kemacetan Kota Samarinda**

NO	TITIK RAWAN KEMACETAN	KECAMATAN	PENYEBAB KEMACETAN
1	SIMPANG GUNUNG LINGAI	Samarinda utara	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
2	LEMPAKE - KEBUN AGUNG	Samarinda utara	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
3	SIMPANG SEMPAJA	Samarinda utara	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
4	FLY OVER AIR HITAM	Samarinda ulu	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
5	SIMPANG AIR PUTIH	Samarinda ulu	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
6	JL.SURYANATA	Samarinda ulu	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
7	SIMPANG 4 RING ROAD SURYANATA	Samarinda ulu	Tidak Ada Apill
8	ANTASARI ( SIMPANG 3 CENDANA )	Samarinda ulu	Tidak Ada Apill Dan Parkir Tepi Jalan
9	JL. JUANDA ( DEPAN RUKO BANK MANDIRI )	Samarinda ulu	Tidak Tersedia Kantong Parkir
10	JEMBATAN MAHAKAM ( DUA ARAH - BC/US )	Sei kunjang	Permukaan Jalan, Kapasitas Simpang Kecil
11	SIMPANG 3 MERANTI ( JL. SLAMET RIYADI )	Sei kunjang	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
12	BUKAAN MEDIAN ( DEPAN MASJID DARUL NIKMAH )	Sei kunjang	Permukaan Jalan Berlubang, Manuver Bus Dan Truck
13	JL. SUDIRMAN ( SISI DARAT PASAR PAGI )	Samarinda kota	Pkl & Parkir
14	JL. GAJAH MADA ( PASAR PAGI LAUT )	Samarinda kota	Pkl & Parkir
15	JL. KH. KHOLID	Samarinda kota	Pkl & Parkir
16	JL. PANGLIMA BATUR	Samarinda kota	Pkl & Parkir
17	JL. HIDAYATULLAH	Samarinda kota	Pkl & Parkir
18	SIMPANG 3 JEMBATAN BARU	Samarinda kota	Tidak Ada Apill
19	JEMBATAN 2 SUNGAI DAMA	Sambutan	Pkl & Parkir
20	SIMPANG 3 GUNUNG MANGGAH	Sambutan	Radius Tikung Tidak Ideal Dan Penyempitan Jalan
21	PASAR RAHMAT ( LAMBUNG MANGKURAT )	Samarinda ilir	Pkl & Parkir
22	PASAR SUMBER MAS ( LOA JANAN )	Loa janan ilir	Pkl & Parkir
23	SIMPANG 3 APT. PRANOTO CIPTO MANGKUSUMO	Loa janan ilir	Tidak Ada Apill
24	PASAR BAQA ( JL. SULT. HASANUDIN SAMARINDA SEBERANG )	Samarinda Seberang	Pkl & Parkir

Sumber : Database Seksi Lalu lintas Bidang LLAJ Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Kemacetan lalu lintas dapat disebabkan adanya antrian panjang pada simpangan, kecelakaan, banjir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap



penggunaan rambu lalu lintas dan terjadi kebakaran. Langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan/parasarana seperti:

1. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan,
2. Mengubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah,
3. Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan,
4. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang/*flyover*,
5. Mengembangkan jaringan pelayanan Angkutan Umum,
6. Salah satu upaya mengurangi kemacetan di Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan teknologi *Area Traffic Control System (ATCS)* di 24 titik simpangan dari 39 titik dan dilengkapi Camera CCTV yang berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengatur arus lalu lintas.

Setiap lokasi simpang tersebut dihubungkan dengan Pusat Kendali (*CC-ROOM*) yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang melintas di setiap titik lokasi simpang tersebut. Keberadaan ATCS bukan hanya sebatas penataan ritme lalu lintas dalam melakukan rekayasa lalu lintas sehingga diperoleh kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.

**Gambar 2.3** Peta Jaringan *Area Traffic Control System (ATCS)*





Penataan siklus lampu lalu lintas berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara *real time*, melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Dari teknologi *Area Traffic Control System* (ATCS) juga dapat memantau banjir, dan segera langsung menurunkan petugas lapangan Dinas Perhubungan untuk turun mengatur arus lalu lintas yang jadi penyebab kemacetan di area banjir tersebut.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yaitu :

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang memiliki jaringan jalan untuk jaringan jalan kota;
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota;
3. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota;
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji;
7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal;
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalin, pengelolaan parkir pada kota;
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap angkutan umum;



11. Terpenuhiya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota;
12. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan dapat dilayari;
13. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari;
14. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau;
15. Terpenuhiya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi antar pelabuhan dalam satu kota;
16. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.

*Review* capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2010 - 2015 dan proyeksi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian SKPD Tahun					Rasio Capaian Tahun					KET
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Urusan Perhubungan</b>																			
1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100	0	0	Pada penyusunan Renstra PD 2016-2021, indikator - indikator 2018-2019 belum terintegrasi sehingga tidak ada pencapaian Target
2	Persentase ketersediaan angkutan kota				50.72	52.63	54.76	56.82	58.70	49.70	49.70	49.70	0	0	97.99	94.43	90.76	0	0	
3	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota				50.69	51.18	51.68	52.19	52.70	49.70	49.70	49.70	0	0	98.05	97.11	96.17	0	0	
4	Jumlah orang melalui terminal per tahun				197.156	593.776	564.088	846.132	1.269.198	196.155	556.997	501.999	0	0	99.49	93.81	88.99	0	0	
5	Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)				63.86	70.24	76.63	81.45	84.59	49.70	49.70	49.70	0	0	77.83	70.76	64.86	0	0	
6	Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji				63.636	70.000	77.000	84.700	93.170	57.851	32.412	10.000	0	0	90.91	46.30	12.99	0	0	
7	Persentase kendaraan yang telah melakukan uji				90	90	90	90	90	90	99.59	30	0	0	100	110.6	33.33	0	0	
8	Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)				5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	0	0	100	100	100	0	0	



No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian SKPD Tahun					Rasio Capaian Tahun					KET
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Persentase kapal yang bersertifikasi				81	82	83	84	85	81	82	83	0	0	100	100	100	0	0	
10	Persentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				100	100	100	100	100	80	80	80	0	0	80	80	80	0	0	
11	Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai				100	100	100	100	100	95.50	98.20	45.00	0	0	95.50	98.20	45.00	0	0	
12	Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin				100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	
13	Persentase sub terminal dalam Kondisi baik				75	80	80	83	83	75	75	75	0	0	100	93.75	93.75	0	0	
14	Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai				90	100	100	100	100	90	90	90	0	0	10	90	90	0	0	
15	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda				0	40	60	100	100	4.17	8.33	20.83	0	0	10.43	20.83	34.72	0	0	
16	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik				65	70	75	80	90	65	70	0	0	0	100	100	0	0	0	
17	Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				85	87	92.05	95	97.05	85	85	85	0	0	100	97.70	92.34	0	0	



No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian SKPD Tahun					Rasio Capaian Tahun					KET
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal				65	70	75	80	90	65	70	69.30	0	0	100	100	92.40	0	0	
19	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda				55.80	59.80	62.20	68.20	76.20	55.80	59.80	62.20	0	0	100	100	100	0	0	
20	Berkurangnya titik kemacetan				92	80	72	68	60	92	80	72	0	0	100	100	100	0	0	
21	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kabupaten/Kota				45	55	65	75	90	28.36	28.36	50.00	0	0	63.02	51.56	76.92	0	0	
22	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kabupaten/Kota				15.97	16.66	17.55	18.88	20.66	5.09	18.47	18.47	0	0	31.87	110.8	105.2	0	0	
23	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (ZOSS) pada jalan Kabupaten/Kota				40	50	60	70	80	20	20	20	0	0	50	40	33.33	0	0	
24	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota				44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	26	26	26	0	0	58.51	46.80	39.00	0	0	
25	Jumlah Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor				0	22	30	40	50	0	22	0	0	0	0	100	0	0	0	

Sumber : Database Sub Bagian Perencanaan Program Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016-2021





❖ Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan laporan bulanan dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan serta capaian penganggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	DINAS PERHUBUNGAN																				
	Jumlah Alokasi Belanja																				
	Belanja Tidak Langsung	13,431,979,034	13,431,969,034	-	-	-	-	12,643,680,934	12,643,680,934	-	-	-	-	94%	94%	-	-	-	-	(0)	-
	Belanja Langsung																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	653,024,000.00	21,128,024,000	-	-	-	-	416,218,675	19,469,902,018	-	-	-	-	64%	92%	-	-	-	-	31%	46%
2	Penyediaan alat tulis kantor	22,500,000.00	11,250,000	-	-	-	-	22,440,500	11,200,000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	(1)	(1)
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	256,500,000.00	188,250,000	-	-	-	-	255,325,000	187,833,700	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	(0)	(0)



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Penyediaan komponen instalasi /penerangan bangunan kantor	3,393,000.00	4,196,500	-	-	-	-	3,383,800	4,185,000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	(0)	(0)
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	131,900,000	-	-	-	-	-	118,700,000	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300,000,000.00	250,000,000	-	-	-	-	288,156,872	249,991,035	-	-	-	-	96%	100%	-	-	-	-	(0)	(0)
7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	7,185,410,000	7,235,410,000	-	-	-	-	6,841,360,640	6,926,107,400	-	-	-	-	95%	96%	-	-	-	-	(1)	(0)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																					
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67,500,000.00	154,370,000	-	-	-	-	67,372,400	154,312,000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	823,993,750.00	554,563,000	-	-	-	-	645,473,200	541,063,427	-	-	-	-	78%	98%	-	-	-	-	-	-
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	75,000,006.00	37,500,000	-	-	-	-	73,370,000	37,395,200	-	-	-	-	98%	100%	-	-	-	-	-	-



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																					
11	Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan, Kebijakan Perhubungan, Monitoring dan Evaluasi	50,000,000	-	-	-	-	-	49,321,250	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-	-
12	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
13	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan		310,000,000	-	-	-	-		283,138,499	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ</b>																					
14	Pembangunan Samarinda Baru	10,000,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
15	Pembangunan Bandara Samarinda Baru ( Bankeu Prov. APBD 2016 )	9,750,000,000	-	-	-	-	-	9,750,000,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pembangunan Samarinda Baru ( Pembayaran Kewajiban Pihak ketiga )	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	BSB NCR ( Bankeu Prov. APBD 2017 )	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-		100%	-	-	-	-	-	-
18	Pembangunan ( BSB ) Bandara Samarinda Baru ( PT. NCR ) ( Bankeu Prov. APBD 2017 )	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-		100%	-	-	-	-	-	-
19	Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System ( ATCS )	500,000,000	700,000,000	-	-	-	-	498,099,000	678,242,800	-	-	-	-	100%	97%	-	-	-	-	0.4	0
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>																					
20	Upt. Terminal	150,000,000	-	-	-	-	-	148,535,000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
21	Upt. Terminal ( Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015 )	92,975,000	-	-	-	-	-	92,975,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
22	Upt. Pengelolaan dan Dermaga	84,143,000	-	-	-	-	-	56,840,000	-	-	-	-	-	68%	-	-	-	-	-	-	-
23	Wahana Tata Nugraha (WTN)	150,000,000	157,000,000	-	-	-	-	109,110,000	136,287,600	-	-	-	-	73%	87%	-	-	-	-	0.5	0
24	Kampanye dan SAR Keselamatan Pelayanan Sungai	100,000,000	150,000,000	-	-	-	-	97,750,000	147,578,400	-	-	-	-	98%	98%	-	-	-	-	0.5	1



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	DAK Bidang Transportasi ( DAK Perhubungan 2016 )	98,496,000	548,000	-	-	-	-	95,477,000	-	-	-	-	-	97%	0%	-	-	-	-	(0.10)	(1)
26	DAK Perhubungan Realokasi DAK 2015	25,417,000	202,000	-	-	-	-	25,215,000	-	-	-	-	-	99%	0%	-	-	-	-	(0.10)	(1)
27	Pengendalian dan Oprasional Lalu Lintas Angkutan Sungai	-	85,000,000	-	-	-	-	-	85,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
28	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
29	Penataan Kantong Parkir Tepian Mahakam Segmen Mesjid Raya Kantor Pos	222,857,850	-	-	-	-	-	222,857,850	-	-	-	-	-	100%		-	-	-	-	-	-
	<b>Program Keselamatan</b>																				
30	Uji Kelayakan Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	-	750,000,000	-	-	-	-	-	643,350,223	-	-	-	-		86%	-	-	-	-	-	-
31	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	-	200,000,000	-	-	-	-	-	193,311,500	-	-	-	-		97%	-	-	-	-	-	-



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
32	Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor JL.HM.ARDANS	-	384,725,000	-	-	-	-	-	352,928,600	-	-	-	-	92%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>																					
33	UPT. PKB	648,489,500	-	-	-	-	-	641,317,500	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	(1)	0
34	UPT.PKB ( Pembayaran Lewajiban Pihak Ketiga	224,756,950	-	-	-	-	-	224,756,950	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu – Lintas</b>																					
35	Pengawasan dan Penindakan terhadap Kegiatan Lalulintas Jalan dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda	717,500,000	715,000,000	-	-	-	-	71,874,000	714,090,000	-	-	-	-	10%	100%	-	-	-	-	(0)	9
36	Penunjang Operasional Ruang Kendali Area Traffic Control System (ATCS)	150,000,000	143,000,000	-	-	-	-	144,804,600	136,311,300	-	-	-	-	97%	95%	-	-	-	-	(0.04)	(0)



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
37	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas ( Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga )	667,029,000	-	-	-	-	-	667,029,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
38	Penunjang Operasional Ruang Kendali Area Traffic Control System (ATCS) ( Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga )	160,403,000	-	-	-	-	-	160,403,000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
39	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	85,000,000	-	-	-	-	-	84,500,000	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-
40	Peningkatan Pelayanan Publik pada Pelayanan Parkir	100,000,000	825,000,000	-	-	-	-	96,468,500	794,541,800	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	7.25	7
41	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU )	-	2,580,000,000	-	-	-	-	-	2,510,320,300	-	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	-	-



No	Kegiatan	PAGU ANGGARAN						REALISASI KEUANGAN						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
42	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu LED PJU Smart System	-	4,995,400,000	-	-	-	-	-	4,985,641,045	-	-	-	-		100%	-	-	-	-		
43	Inventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan Khusus	-	75,000,000	-	-	-	-	-	69,629,500	-	-	-	-		93%	-	-	-	-		
44	Pengadaan Marka Jalan		319,608,432	-	-	-	-	-	315,080,400	-	-	-	-		99%	-	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>46,761,367,090</b>	<b>64,270,946,932</b>	-	-	-	-	<b>31,815,934,737</b>	<b>61,930,641,747</b>	-	-	-	-	<b>68%</b>	<b>96%</b>					<b>0.37</b>	<b>1</b>

Sumber: Database Sub Bagian Perencanaan Program Renstra Dishub Kota Samarinda Tahun 2016-2021





## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **1. Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

- a. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan
- b. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau
- c. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan missal
- d. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan
- e. Pembebasan lahan
- f. Percepatan pembangunan ekonomi
- g. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil
- h. Meningkatnya angka kecelakaan (khusus transportasi darat)
- i. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna kendaraan pribadi.
- j. Kondisi tata ruang kota yang telah terbangun dengan dimensi dengan jalan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan yang terus meningkat
- k. Telah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih efisien dari ada kendaraan umum
- l. Jaringan transportasi jalan yang ada telah di kelilingi kawasan pemukiman masyarakat sehingga terkendala dalam pembebasan lahan
- m. Berkurangnya kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 tentang alur pelayanan sungai
- n. Belum ditetapkannya dokumen tata ruang kota sebagai acuan atau pedoman perencanaan pembangunan daerah
- o. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

### **1. Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah (walau masih terbatas) baik sumber dana APBN, Provinsi maupun APBD Kota sebagai faktor pendukung keberhasilan operasional pelayanan sektor transportasi



- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
- c. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan
- d. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal
- e. Kuantitas personil yang memadai
- f. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar
- g. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi
- h. Visi dan misi Walikota terpilih yang menempatkan peningkatan infrastruktur sebagai program prioritas.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

###### **3.1.1 Permasalahan Sekretariat**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat, antara lain :

1. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM yang bersertifikat keahlian di bidang perhubungan
2. Gedung kantor yang ada kurang representatif untuk mendukung pelayanan PD, suasana kerja dan tata ruang kantor kurang mendukung aparatur untuk bekerja maksimal
3. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Pendukung Kantor, dan Sarana dan Prasarana Operasional yang ada kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.

###### **3.1.2 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Lalu Lintas Jalan, antara lain :

1. Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan
2. Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan management lalu lintas
3. Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) yang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
4. Belum optimalnya penegakan atas aturan atau regulasi terhadap pergerakan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan pada wilayah kota
5. Terbatasnya jumlah petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga belum dapat optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian baik di bidang lalu lintas angkutan jalan dan bidang lalu lintas angkutan sungai



6. Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan dalam berlalu lintas secara bersama-sama dengan instansi terkait
7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan terbatasnya sarana utama dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya
8. Belum optimalnya koordinasi dalam hal penyelarasan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan
9. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Seksi Perparkiran memiliki beberapa permasalahan antara lain :
  - a. Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan, hal ini perlu dilakukan upaya pembekalan dan pembinaan sikap dan mental, serta teknis pelaksanaan tugas
  - b. Perbandingan petugas juru parkir dengan wilayah yang dilayani tidak sebanding sehingga diperlukan penambahan petugas sebagai juru parkir
  - c. Kurangnya ketersediaan pembangunan kantong parkir dan gedung parkir serta penerapan teknologi tepat guna yang dapat menampung sejumlah kendaraan sehingga aktifitas parkir tepi jalan dapat dikurangi secara drastis atau dihilangkan sama sekali
  - d. Kurangnya kendaraan operasional sehingga kinerja petugas tidak dapat optimal dan baik
  - e. Belum optimalnya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna pembinaan dan peningkatan kinerja.

### **3.1.3 Permasalahan Bidang Prasarana**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Prasarana, antara lain :

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat
2. Belum tersedianya rencana induk pengembangan transportasi sungai
3. Masih banyak terminal angkutan sungai yang belum memiliki studi lingkungan



4. Kurang tersedianya fasilitas penunjang berupa rambu-rambu navigasi, halte dan fasilitas lainnya untuk alur pelayaran
5. Adanya pemahaman yang berbeda antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
6. Belum adanya kepastian informasi berkaitan penanganan kerjasama dengan Pelindo dan KSOP untuk Terminal Peti Kemas Palaran dan Terminal Penumpang Umum
7. Belum terdatanya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan galangan – galangan kapal yang berada dalam wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut Samarinda
8. Belum optimalnya kegiatan pendataan dan inventrisasi terhadap fasilitas keselamatan dan keamanan di sektor perhubungan secara baik sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya kinerja sektor perhubungan
9. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di terminal, Seksi Prasarana Jalan selaku pengelola terminal memiliki beberapa permasalahan antara lain :
  - a. Kurangnya kompetensi petugas terminal dalam pelaksanaan tugas
  - b. Kurangnya jumlah personi terminal yang proporsional
  - c. Belum memadainya fisik fasilitas utama dan pendukung terminal sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyedia jasa angkutan belum optimal.

#### **3.1.4 Permasalahan Bidang Keselamatan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Keselamatan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dan Kedisiplinan Masyarakat dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan
2. Tingginya jumlah angka kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya
3. Kondisi permukaan jalan yang memiliki kinerja kurang baik untuk digunakan untuk lalu lintas angkutan jalan dan kendaraan lainnya karena adanya kerusakan jalan dengan tingkat ringan, sedang hingga berat yang belum segera dilakukan perbaikan
4. Minimnya fasilitas keselamatan pelayaran transportasi sungai



5. Pendangkalan alur pelayaran transportasi sungai di beberapa titik (spot) sepanjang sungai
6. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi keahlian di bidang sungai
7. Manajemen perusahaan angkutan umum yang masih konvensional atau tradisional
8. Belum dilaksanakannya investigasi dan audit pelayanan transportasi sungai
9. Belum terbentuknya Dewan Maritim Kota
10. Perlunya pemisahan kewenangan penanganan kapal-kapal GT 7 ke bawah dan GT 7 ke atas.
11. Untuk memberikan jaminan atas kelaikan kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang yang beroperasi di jalan, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas antara lain :
  - a. Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dengan berbagai tingkatannya sesuai dengan kompetensinya sangat terbatas dan perlu dilakukan penambahan dengan cara penerimaan pegawai baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan / atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan kompetensi dimaksud
  - b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga kecermatan dan keakuratan terhadap hasil pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai
  - c. Belum optimalnya kecepatan dan efisiensi waktu serta keakuratan hasil pengujian pada pengujian kendaraan bermotor yang harus didukung dengan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

### **3.1.5 Permasalahan Bidang Angkutan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Angkutan, antara lain :

1. Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum
2. Perlunya peningkatan dan pembinaan kepada para pemilik pengusaha serta operator lapangan dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi angkutan umum agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar yang sehat



3. Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu biaya dan kondisi lainnya.
4. Kinerja pelayanan angkutan sungai yang masih rendah
5. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan sungai
6. Belum terciptanya pelaporan angkutan sungai baik penumpang dan atau barang secara periodik
7. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai
8. Pengawasan dan pengendalian bagi kapal pada lalu lintas angkutan sungai belum optimal karena keterbatasan sarana dan fasilitas utama berupa kapal cepat dan kapal patroli.

### **3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kota Samarinda, yakni ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”***.

Mengacu pada Visi Kota Samarinda tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Kota Samarinda, yakni :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparaturnya yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;



6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religious.

Apabila mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2016-2021, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 3 (tiga), yakni **“Mewujudkan Ruang Kota yang Layak Huni”**. Salah satu agenda prioritas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan masuk di agenda prioritas 4 (empat) Kepala Daerah, yaitu **“Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Berwawasan lingkungan”**. Dengan demikian tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mendukung dan melaksanakan agenda prioritas 4 (empat) tersebut, yaitu **“Meningkatnya Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Kota”**. Sedangkan target RPJMD untuk mendukung meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota, yaitu :

1. Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik
2. Prosentase Berkurangnya titik macet

Dalam mewujudkan Misi ke 3 (tiga) Walikota dan Wakil Walikota, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
5. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;





6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Agar terjadi sinkronisasi antara pembangunan perhubungan di Kota Samarinda dengan pembangunan perhubungan di tingkat provinsi dan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa : Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan serta kapasitas transportasi.

#### **1. Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi:
  - a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi  
Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah



- dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang menangani fungsi pengawas keselamatan;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
  - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini. Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan;
  - d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (*human error*) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;



- f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan. Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional.;
- g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi. Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan;
- h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya. Pengujian kehandalan/kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;
- i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah. RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat *Decade of Action for Road Safety 2011-2020* Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4/2013 tertanggal 11 April 2013. Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:
  - a. Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral;
  - b. Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum;



- c. Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan;
- d. Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI;
- e. Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui *Decade of Action* memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu.

- j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang diterjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat UU 23/2007, setiap perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36/2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.
2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi. Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan, serta pemberian sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi. Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari



- penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemidai barang-barang berbahaya dan alat pemidai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi;
- c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparaturnya pengawas keamanan transportasi.

## **2. Pelayanan Transportasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu antara lain :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
5. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

- a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute. Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus type A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan



- jaringan jalan kereta api, sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan keandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia;
- b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
  - c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual;
  - d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan. Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap



waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan.

2. Sasaran terpenuhinya Sumber Daya Manusia transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, ditempuh melalui strategi antara lain :

- a. Menyusun *Man Power Planning* Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam rangka mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui *Training Needs Analysis* (TNA) Sumber Daya Manusia transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan Sumber Daya Manusia baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan *man power planning* Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA);



- c. Mengembangkan kapasitas diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan *upgrading* skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi;





- d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Sumber Daya Manusia transportasi;
- e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan;

- f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional



maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Berdasarkan kutipan arah kebijakan dan strategi pada Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2014-2019, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana harus memperhatikan masyarakat difabel dan kesetaraan gender.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**

Kebijakan Renstra Dinas perhubungan ditetapkan, secara cermat telah ditetapkan tujuan dan targettarget/sasaran pembangunan di setiap bidang/sector pembangunan. Merujuk kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dibedah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum;
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Apabila mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018, adapun Visi Provinsi Kalimantan Timur, yakni : **“MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMUR SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGRO INDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”**.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan juga dapat dipandang sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya (Portes, 1976). Ini berarti bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki



berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial - ekonomi dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Pembangunan sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi, pembangunan sosial Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dimana Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 74,52 dan meningkat menjadi 76,71 pada tahun 2012.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta



penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023, membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km<sup>2</sup>. Hal ini, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

**Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033**

No	Kecamatan	Jumlah	Rencana Distribusi Penduduk	
		2013	2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
	<b>Jumlah</b>	<b>805.687</b>	<b>1.057.671</b>	<b>1.388.466</b>

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

**Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan** terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

**Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan**, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

- **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.



**Jaringan dan Layanan Kereta Api** meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.

**Stasiun Kereta Api** meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

**Tatanan Kepelabuhan** terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.

**Alur Pelayaran** meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

## **2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari: 1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

**Pembangkit Tenaga Listrik** terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.



**Gardu Induk** terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik** terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.

**Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi** terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.





Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota. 7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

**Tabel 3.2 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota**

<b>Pusat Pelayanan Kota (PPK)</b>	<b>Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)</b>	<b>Pusat Lingkungan (PL)</b>
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan,	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan IIdi Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;



<b>Pusat Pelayanan Kota (PPK)</b>	<b>Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)</b>	<b>Pusat Lingkungan (PL)</b>
	pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;</li><li>4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;</li><li>5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;</li><li>6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;</li><li>7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;</li><li>8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;</li><li>9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan</li></ol>



<b>Pusat Pelayanan Kota (PPK)</b>	<b>Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)</b>	<b>Pusat Lingkungan (PL)</b>
		Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; 10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini :



**Tabel 3.3 Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda**

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.</p> <p>b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor.</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), kawasan pengolahan ikan, Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
2.	Samarinda Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan V Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), kawasan rawan bencana alam (longsor) b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri (kecil dan makro, sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
3.	Samarinda Kota	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota , Kelurahan Bugis.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.
4.	Samarinda Seberang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
5.	Samarinda Utara	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).</p>





No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan II Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan).</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan VI</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.  b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		d. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).  b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).
9.	Palaran	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur.  Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut.  b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).  b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
10.	Loa Janan Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga.  Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Potensi Pengembangan Kota Samarinda**

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	<p>a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M<sup>2</sup> per unit;b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M<sup>2</sup> per unit; danc. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M<sup>2</sup> per unit.</p> <p>b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha.</p> <p>c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.</p> <p>d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.</p>
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	<p>a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.</p> <p>b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.</p> <p>c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.</p>
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	<p>a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang;</p> <p>b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>Iilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.</p> <p>a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.</p>
5.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Iilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Iilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Iilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Iilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Iilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Iilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Iilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Samarinda Ilir. c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: 1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajan Ilir dan Sambutan. b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara. c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.
9.	Kawasan Strategis	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan

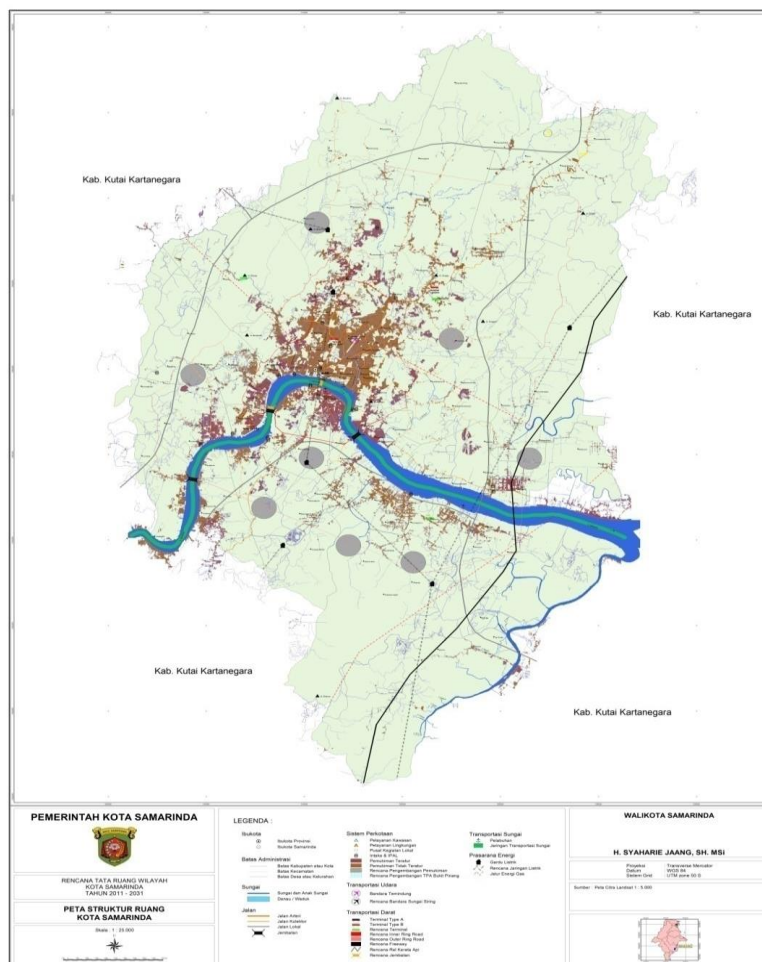




No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
	Kota	<p>Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.</p> <p>b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.</p> <p>c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.</p> <p>d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.</p>

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

**Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Kota Samarinda**





**Tabel 3.5 Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Perwujudan Struktur Ruang</b>										
<b>1</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>										
<b>1.1</b>	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota									
<b>1.1.1</b>	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
<b>1.1.2</b>	<b>Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,</b>			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
2)	Penyusunan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum						
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim						
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000								
	DL										
	<b>1.2 Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan</b>										
1.2 .1.	Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih .2. Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	APBD Kab. Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2 Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertum-buhan sehingga Pusat Kegiatan .3. Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
<b>2</b>	<b>Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah</b>										
	<b>2.1 Transportasi</b>										
	a Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	b Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan Pengairan						
d	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM						
1)	Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
2)	Pembangunan Prasarana DAN Sarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
2.2	Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan						
2.3	Penyusunan Masterplan Telematika Penyediaan tower BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
<b>B</b>	<b>Perwujudan Pola Ruang</b>										
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
1.2	Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000								
1.3	Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
1.4	Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD						
1.5	Pengembangan Pertanian lahan lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian						
2	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>			APBD Kota Samarinda							



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000								
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000								
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000								
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000								
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000								
2.2	Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
2.3	Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan						
<b>B</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten</b>										
1.1	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata						
1.2	Penataan Kawasan Strategis Kota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag						





Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam



- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan–Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan–Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk: Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.



### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Memperhatikan kondisi dan sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, isu strategis sektor Perhubungan Kota Samarinda yang menjadi prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan yang memenuhi standar
2. Kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang bersertifikat keahlian disektor Perhubungan



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2016 – 2021 ini Perangkat Daerah di Kota Samarinda tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi dan misi Walikota Samarinda, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### **✚ Visi dan Misi Walikota Samarinda**

Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB III, bahwa Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”*** Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah sebanyak 6 (enam) misi.

Dalam Dokumen Perubahan RENSTRA ini Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 3 (tiga), yakni ***“Mewujudkan Ruang Kota yang Layak Huni”***. Salah satu agenda prioritas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan masuk di agenda prioritas 4 (empat) Kepala Daerah, yaitu ***“Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Berwawasan lingkungan”***. Dengan demikian tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mendukung dan melaksanakan agenda prioritas 4 (empat) tersebut, yaitu ***“Meningkatnya Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Kota”***. Sedangkan target RPJMD untuk mendukung meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik



2. Berkurangnya titik kemacetan

#### **4.1.1 Tujuan Dinas Perhubungan**

Tujuan Dinas Perhubungan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi Walikota Samarinda sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Walikota Samarinda sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi Walikota Samarinda.

Untuk mewujudkan Misi Walikota Samarinda maka ditetapkan satu tujuan Dinas Perhubungan yaitu ***Meningkatnya pelayanan disektor Perhubungan.***

#### **4.1.2 Sasaran Dinas Perhubungan**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, adapun sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan
2. Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia (SDM)



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelayanan pelayanan disektor Perhubungan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	61,87	61,87	61,87	65,81	68,67	70,13
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39,37	39,37	39,37	39,44	39,50	39,57
		Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	59,05	59,05	60,00	60,95	61,90	62,86
	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	Prosentase berkurangnya titik macet	100	80,00	72,00	68,00	60,00	56,00
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guadril, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/Kota)	30,68	45,70	57,15	62,05	68,66	80,42



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perhubungan Kota Samarinda mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

##### **5.1.1 Strategi Dinas Perhubungan**

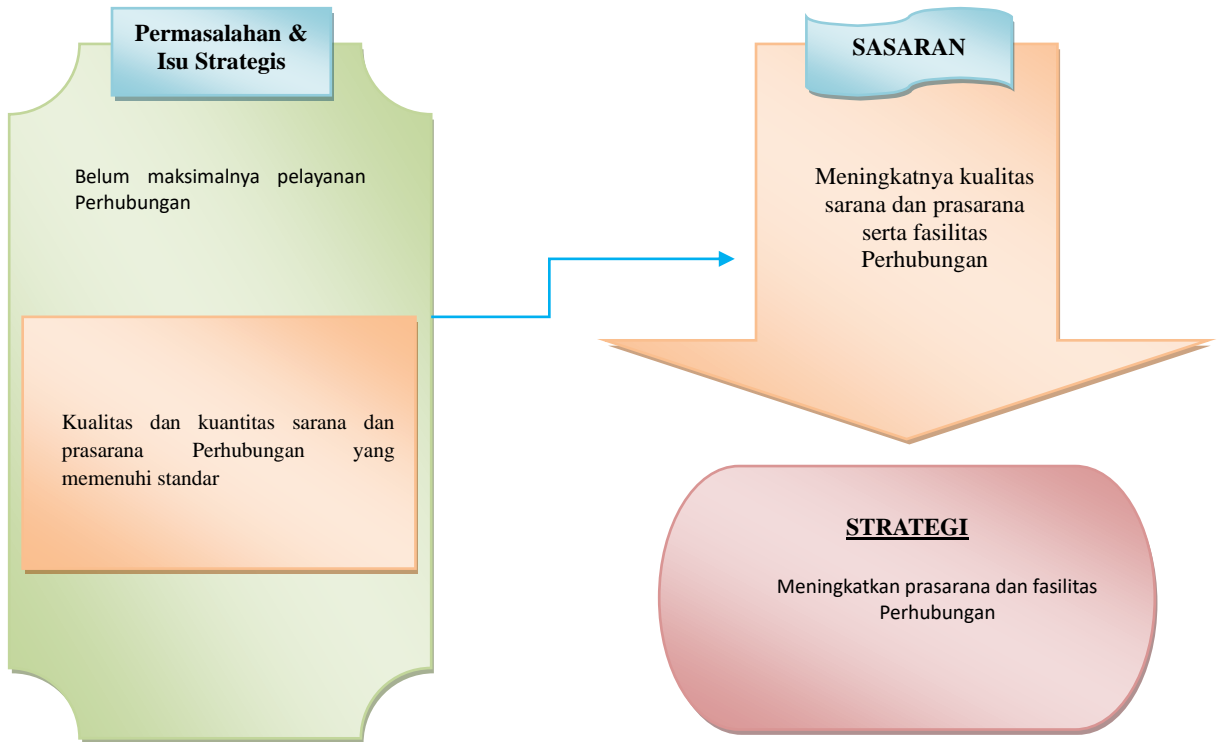
Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

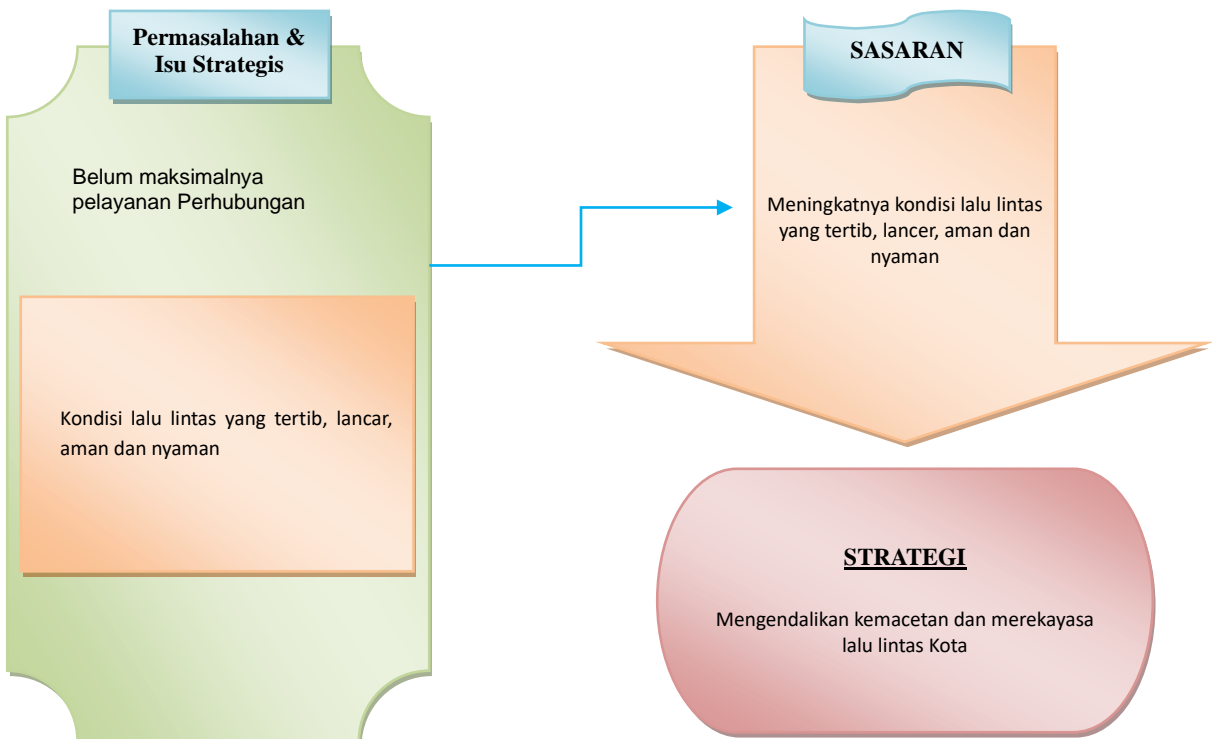
Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta kadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :



1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas Perhubungan

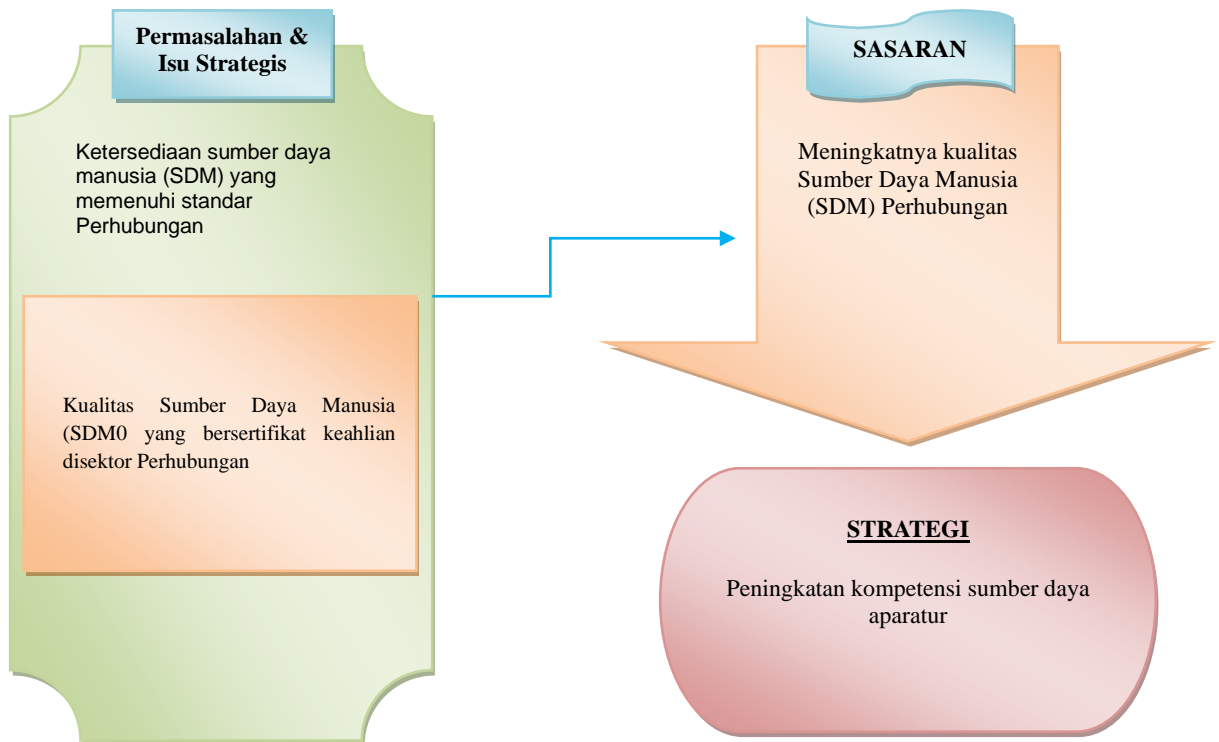


2. Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas





### 3. Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur



#### 5.1.2 Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Walikota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Perhubungan
2. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
3. Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan program dalam pencapaian Misi Ketiga **Mewujudkan ruang kota yang layak huni** maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda



<b>VISI :</b>	<b>TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>		
<b>MISI 3 :</b>	<b>MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya pelayanan disektor Perhubungan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	Meningkatkan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Perhubungan
	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas	Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN**

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah terwujud untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang diluangkan kedalam rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Samarinda membuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
1. Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>8.065.078.000</b>	<b>100 %</b>	<b>29.871.963.400</b>	<b>100 %</b>	<b>21.128.024.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	16 Rekening	11112 rekening	653.024.000	11112 rekening	21.128.024.000	11112 Rekening	21.212.024.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
	2. Meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib lancar, aman dan nyaman		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	5 jenis	5 jenis	22.500.000	5 jenis	11.250.000	5 jenis	11.250.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	4 dokumen	256.500.000	4 dokumen	188.250.000	4 dokumen	229.700.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	3.393.000	12 jenis	4.196.500	12 jenis	4.196.500	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perhubungan		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	-	2 jenis	131.900.000	2 jenis	36.200.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Presentase rapat koordiasinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	100 %	100 %	300.000.000	100%	250.000.000	100%	225.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	396 orang	396 orang	7.185.410.000	396 orang	7.235.410.000	396 orang	7.697.210.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>966.493.756</b>	<b>100 %</b>	<b>746.433.000</b>	<b>100 %</b>	<b>702.103.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	100 %	67.500.000	100 %	154.370.000	100 %	33.750.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	100 %	823.993.750	100 %	554.563.000	100 %	630.853.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihar	100 %	100 %	75.000.006	100 %	37.500.0000	100 %	37.500.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	100 %	-	-	-	-	100 %	372.040.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	-	-	550 orang	372.040.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP</b>	60.00 %	60.00 %	-	60.10 %	310.000.000	63.39 %	75.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT(RKA&DPA), LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan Keuangan	8 Dokumen	-	-	8 Dokumen	310.000.000	8 Dokumen	75.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			<b>Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>Prosentase ketersediaan dokumen Perhubungan</b>	7,69 %	-	100.000.000	-	18.328.500.000	7,69 %	30.948.054.135	Dinas Perhubungan	Smd
			Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan, Kebijakan Perhubungan, Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru (bankeu prov. APBD 2016)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	25.00 %	9.750.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	25.00%	10.000.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru ( pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	50 %	12.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pembangunan BSB (PT. NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	100 %	5.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			BSB (Utang NCR) (ABT) (Bankeu Provinsi APBD – P Tahun 2017)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	100 %	5.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi kota Samarinda	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	25.00 %	-	-	-	-	1 Dokumen	864.084.000	Seksi lalu lintas jalan	Smd
			Pembuatan Detail Engineering Design Dermaga Mahakam Ilir	Dokumen DED Dermaga Mahakam ilir	-	-	-	-	-	1 Dokumen	347.750.500	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pembayaran utang NCR	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	72%	34.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
			Hutang NCR (ABT)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	90%	27.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	90.00 %	24.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
				<b>Persentase ketersediaan prasarana fasilitas perhubungan</b>	<b>21.74</b>	-	-	-	-	<b>21.74 %</b>	<b>250.000.000</b>		<b>Smd</b>
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Dermaga yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	3 Dermaga	-	-	-	-	3 Dermaga	250.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>60,91</b>	<b>60,91</b>	<b>600.000.000</b>	<b>64,68</b>	<b>14.442.050.000</b>	<b>72,54</b>	<b>7.600.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penertiban parkir kota samarinda	100 titik	100 titik	100.000.000	-	-	-	-	Seksi Perparkiran	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS) terpelihara	34 titik/unit	34 unit/titik	500.000.000	34 unit/titik	2.580.000.000	34 unit/titik	2.475.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpelihara	12 Bulan	-	-	12 Bulan	2.580.000.000	12 Bulan	800.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Persentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan</b>	<b>48,34</b>	<b>48,34</b>	<b>861.663.000</b>	<b>48,64</b>	<b>12.734.128.000</b>	<b>52,11</b>	<b>7.695.300.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			UPT Terminal	Operasional UPT. Terminal	8 terminal	8 Terminal	150.000.000	-	-	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			UPT. Terminal (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	92.975.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			UPT. PKB (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	224.756.950	-	-	-	-	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			DAK Perhubungan (Realokasi DAK 2015)	Rambu – rambu lalu lintas jalan terpasang	100 buah	100 buah	25.417.000	100 buah	202.000	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			DAK Bidang transportasi (DAK Perhubungan 2016)	Rambu – rambu lalu lintas jalan terpasang	100 buah	100 buah	98.496.000	100 buah	548.000	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			UPT. Pengelolaan dan dermaga	Operasional UPT. Pengelolaan dan Dermaga	5 Dermaga	5 Dermaga	84.143.000	-	-	-	-	Seksi angkutan jalan	Smd
			Penataan kantong parkir tepian Mahakam segmen masjid raya – kantor pos pasar pagi (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	1 Lokasi	1 lokasi	222.857.850	-	-	-	-	Seksi perparkiran	Smd
			Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	5 Dermaga	-	-	5 Dermaga	100.000.000	5 Dermaga	450.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan bermotor yang di uji dan laik jalan	44.500 unit	-	-	44.500 unit	750.000.000	44.500 unit	743.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan dalam lomba wahana tata nugraha	1 penghargaan WTN	1 Penghargaan WTN	150.000.000	1 Penghargaan WTN	157.000.000	1 Penghargaan WTN	140.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Pengendalian, pengawasan dan operasional lalulintas angkutan sungai	30 Kali	-	-	30 kali	85.000.000	30 kali	125.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	30 Nahkoda	30 Nahkoda	100.000.000	40 Nahkoda	150.000.000	50 Nahkoda	700.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Pelaksanaan pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	-	-	-	-	5 awak kendaran dan 5 pelajar	75.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas</b>	<b>Prosentase menurunnya angka kecelakaan</b>	<b>Persentase</b>	<b>93,53</b>	<b>867.500.000</b>	<b>92,35</b>	<b>39.723.670.000</b>	<b>91,18</b>	<b>43.075.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan kota samarinda	10 kali	-	-	10 kali	85.000.000	10 kali	50.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	30 kali	30 kali	717.500.000	30 kali	715.000.000	40 kali	250.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda sebagai fasilitas pengendalian dan keselamatan lalulintas	m <sup>2</sup>	-	-	7.500m <sup>2</sup>	319.608.432	7.900m <sup>2</sup>	2.195.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Laporan pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	143.000.000	4 Dokumen	75.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali ATCS (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	160.403.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan rambu – rambu lalu lintas (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	667.029.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penataan parkir tepi jalan	100 Titik	0	0	100 titik	825.000.000	100 titik	960.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Iventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan khusus	Dokumen inventarisasi perusahaan dan armada angkutan khusus	-	-	-	1 dokumen	75.000.000	-	-	Seksi lalu lintas	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu LED PJU Smart System	Jaringan lampu LED PJU Smart system terpasang	-	-	-	2 Lokasi Jaringan	4.995.400.000	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan marka jalan	Marka jalan terpasang	3000 Meter	-	-	-	-	3000 m	2.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan	Papan nama jalan terpasang	150 Buah	-	-	-	-	201 buah	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu 60 cm	Rambu 60 cm terpasang	-	-	-	-	-	158 rambu	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			DAK Transportasi 2016	Rambu terpasang	-	-	-	-	-	100 rambu	548.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Lampu LED terpasang di jalan protokol	-	-	-	-	-	3 Lokasi Jaringan	6.454.665.598	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Presentase kendaraan bermotor yang diuji</b>	<b>90.00 %</b>	<b>90.00 %</b>	<b>750.000.000</b>	<b>99.59 %</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>95.77 %</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan fasilitas penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan HM. Ardans	gedung pengujian kendaraan bermotor tersedia	1 Gedung	12 bln	-	12 bln	384.725.000	12 bln	2.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			UPT. Pengujian kendaraan bermotor (PKB)	Kendaraan yang di uji dan laik jalan	1 Unit	40.000 unit	721.675.100	-	-	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Lanjutan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor jalan HM. Ardans Samarinda (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Gedung PKB	1 Unit	1 unit	648.489.500	-	-	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	10 kali	0	0	10 kali	200.000.000	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd

Lanjutan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019, 2020 & 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelayanan administrasi perkantoran	Presentase	100 %	8.779.463.700	100 %	34.322.000.000	100 %	37.140.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	1112 Rekening	11112 Rekening	21.213.000.000	11112 Rekening	23.000.000.000	11112 Rekening	24.000.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	5 jenis	15.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	60.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	193.260.000	4 Dokumen	230.000.000	4 Dokumen	250.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	2.500.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	10.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Snd
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	98.000.000	2 jenis	180.000.000	2 jenis	250.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	100 %	150.000.000	100 %	450.000.000	100 %	550.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTTB serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	396 orang	396 orang	8.299.490.700	396 orang	10.400.000.000	396 orang	12.000.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase penyediaan makanan dan minuman	100 %	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>717.353.000</b>	<b>100 %</b>	<b>940.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.130.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	100 %	45.000.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	100 %	630.853.000	100 %	700.000.000	100 %	800.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	100 %	41.500.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Presentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	100 %	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	627 orang	627 orang	450.000.000	627 Orang	500.000.000	627 Orang	600.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan</b>	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi	Jumlah peningkatan SDM dan peralatan pengelolaan Administrasi	-	10 orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai E valuasi SAKIP</b>	Nilai	64.00	100.000.000	65.00	500.000.000	65.40	500.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan keuangan	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	500.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			<b>Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>Presentase ketersediaan prasana fasilitas perhubungan</b>	7.69 %	82.61	3.730.090.535	86.96	45.840.044.803	91.30	45.490.044.803	Bidang Prasarana	Smd
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana fasilitas jalan	Perangkat lunak sistem informasi Dinas Perhubungan kota Samarinda	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Program)	Smd
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi	Perangkat lunak sistem informasi Perhubungan	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Program)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana galangan	Perangkat lunak system informasi sarana prasarana galangan	-	-	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pengadaan sistem informasi fasilitas keselamatan jalan	Sistem informasi fasilitas keselamatan jalan	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Peningkatan sarana dan prasarana dermaga	3 Dermaga	3 Dermaga	300.000.000	3 Dermaga	500.000.000	3 Dermaga	500.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Kendaraan Operasional (Mobil Derek, mobil crane hidrolik, mobil operasional, mobil oprasional pengawasan LPJU, mobil patroli Daltib, Mobil pengawasan parkir, dan Sepeda Motor)	2 Unit	15 Unit sepeda motor patroli Daltib, 1 Unit mobil ops. Pengawasan LPJU, 1 Unit mobil pengawasan parkir, 1 Unit mobil crane hidrolik truckg, 1 Unit mobil crane pick up	2.500.000.000	1 Unit Mobil Derek, 1 Unit Mobil Crane hidrolik, 4 Unit Patroli Daltib, 1 unit pengawasan parkir, 1 Unit mobil operasional, 4 unit sepeda motor	4.800.000.000	1 Unit Mobil Derek, 1 Unit Mobil Crane hidrolik, 4 Unit Patroli Daltib, 1 unit pengawasan parkir, 1 Unit mobil operasional, 4 unit sepeda motor	5.000.000.000	Subbag. Umum dan kepegawaian	Smd
				<b>Persentase ketersediaan dokumen perhubungan</b>	<b>12.50</b>	<b>18.75</b>		<b>25.00</b>		<b>31.25</b>			
			Survey galangan kapal dan TUKS batubara serta konsultasi kekementerian Perhubungan	Laporan hasil survey galang kapal dan TUKS batu bara	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Dokumen	150.000.000	Seksi Prasarana multimoda	Smd
			Pembuatan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL) gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen Amdal gedung kantor Dinas Perhubungan kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Umum dan kepegawaian)	Smd
			Perencanaan teknis DED pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen DED pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Umum dan kepegawaian)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembangunan bandara samarinda baru (pembayaran hutang pada pihak ketiga)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	80.090.535	-	-	-	-	Samarinda	Smd
			Pembangunan bandara samarinda (Bankeu Provinsi)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	1.699.091.064	-	-	-	-	Dishub Provinsi	Smd
			SID alur pelayaran DLKP DLKR dermaga dan pelabuhan Samarinda	Dokumen DLKP DLKR dermaga dan pelabuhan Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID kolam dermaga Mahakam ilir	Dokumen SID kolam dermaga Mahakam ilir	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID kolam dermaga harapan baru	Dokumen SID dermaga harapan baru	-	-	-	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	800.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			DEDDermaga loa janan ilir	Dokumen DED dermaga loa janan ilir	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Kajian kinerja jalan	Dokumen kajian kinerja jalan	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			DED Dermaga harapan baru	Dokumen DED Dermaga harapan baru	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap II	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	1 Dokumen	1.000.000.000	-	-	-	-	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap III	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	-	-	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap IV	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	Dokumen prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	-	-	-	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pendataan dan pengawasan keselamatan jalan	Laporan pendataan dan tersedianya data pengawasan keselamatan jalan	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembuatan masterplan pelabuhan & dermaga	Dokumen masterplan pelabuhan & dermaga	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Angkutan Sungai	Smd
			<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Prosentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai standar pelayanan minimal</b>	<b>60.91 %</b>	<b>81.61</b>	<b>7.950.000.000</b>	<b>87.03</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>90.19</b>	<b>4.650.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS) yang dipelihara	34 Titik	34 Titik	1.650.000.000	34 Titik	3.500.000.000	34 Titik	4.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terminal dalam kota yang terpelihara	-	1 Terminal	1.000.000.000	4 Terminal	3.000.000.000	4 Terminal	3.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyeberangan	Halte dan gapura penyeberangan yang direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	500.000.000	4 unit	500.000.000	4 unit	500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pemeliharaan dermaga dalam kota Samarinda (Bankeu)	Dermaga dalam kota Samarinda yang dipelihara	-	1 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pemeliharaan dermaga kota Samarinda	Dermaga dalam kota Samarinda yang dipelihara	-	5 Unit	500.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai	Kendaraan operasional sungai yang dipelihara	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000.000	12 Bulan	3.500.000.000	12 Bulan	3.500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Prosentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan</b>	<b>48.34</b>	<b>57.40</b>	<b>900.000.000</b>	<b>74.02</b>	<b>9.063.479.000</b>	<b>92.45</b>	<b>10.863.479.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	Terminal yang aman dan nyaman bagi penumpang pengguna terminal	-	-	150.000.000	5 Terminal	300.000.000	5 Terminal	300.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Dermaga	5 Dermaga	300.000.000	5 Dermaga	300.000.000	5 Dermaga	300.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan yang di uji dan laik jalan	44.500 unit	43.600	500.000.000	44.500	1.500.000.000	44.898	1.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAS dalam kota Samarinda	Laporan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAS dalam kota Samarinda	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan dalam lomba wahana tata nugraha	1 penghargaan WTN	-	-	Penghargaan WTN	200.000.000	Penghargaan WTN	200.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Pengendalian, pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan sungai	30 kali	30 kali	100.000.000	30 kali	200.000.000	30 kali	200.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
			Peningkatan Pelayanan publik pada Proses Perijinan Angkutan	Proses pelayanan perijinan terhadap angkutan kota/umum	1524 Armada dan 36 Taxi argo	1524 Armada dan 36 Taxi argo	100.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	500.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	500.000.000	Seksi Angkutan Jalan	Smd
			Pembentukan dewan maritime Samarinda	Dewan maritime Samarinda	-	-	-	1 Dewan	300.000.000	1 Dewan	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Pelaksanaan kampanye SAR keselamatan pelayaran sungai	70 Peserta	70 peserta	300.000.000	70 peserta	300.000.000	80 peserta	300.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota	Armada angkutan kota yang terdaftar dan diremajakan	-	-	-	100 Unit	500.000.000	100 Unit	500.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Studi penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Dokumen penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Sosialisasi standar pelayanan minimal angkutan umum	Pelaksanaan sosialisasi standar pelayanan minimal angkutan umum	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Peningkatan pelayanan proses perijinan galangan kapal dan TUKS Batu bara	Pelayanan proses perijinan galangan kapal dan TUKS	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Pendataan dan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pengadaan ponton apung	ponton apung	-	1 unit	1.200.000.000	1 Unit	1.200.000.000	1 Unit	1.200.000.000	Seksi prasarana Sungai	Smd





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalulintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	-	-	-	100 Peserta	300.000.000	100 Peserta	300.000.000	Seksi keselamatan pelayaran	Smd
			Study penataan rute dan trayek serta tariff angkutan sungai dalam kota	Dokumen jaringan pelayanan angkutan sungai antar dermaga	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Seksi angkutan sungai	Smd
			Study penataan rute dan pengembangan transportasi sungai dalam kota	Dokumen rute dan trayek sungai dalam kota	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Pelaksanaan pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	200.000.000	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	300.000.000	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			Pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Laporan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	-	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Penunjangoperasional dewan maritim kota	Laporan Operasionalisasi Dewan Maritim	-	-	-	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Survei investigasi alur pelayaran sungai dan dermaga	Dokumen data alur pelayaran sungai dan dermaga	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan samarinda	Pelaksanaan SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan Samarinda	-	-	-	Segmen 4	300.000.000	Segmen 5	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Penertiban angkutan barang di samarinda	Pelaksanaan penertiban angkutan barang di Samarinda	-	-	-	115 Perusahaan angkutan barang	200.000.000	115 Perusahaan angkutan barang	200.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan Angkutan	Sosialisasi Tertib Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	4 sekolah	-	-	4 Sekolah	250.000.000	4 Sekolah	250.000.000	Seksi keselamatan Jalan	Smd
			Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan dan angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Angkutan Khusus	Smd
			Pendataan barang pokok dan barang penting sebagai penunjang data Tim pengendalian inflasi Daerah (TPID)	Dokumen pendataan barang pokok dan barang penting sebagai penunjang data Tim pengendalian inflasi daerah (TPID)	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi angkutan khusus	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan ponton apung dermaga batang aji samarinda seberang	Ponton apung	1 Unit	-	-	1 Unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran (Bankeu)	Alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran	-	-	-	500 Unit	500.000.000	500 Unit	500.000.000	Seksi keselamatan pelayaran	Smd
			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	<b>26.500.000.000</b>	<b>63.41</b>	<b>27.200.000.000</b>	<b>70.00</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pembangunan halte angkutan kota	Halte angkutan kota yang di bangun	4 Halte	4 halte	500.000.000	4 halte	600.000.000	1 halte	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pembangunan halte dan gapura penyeberangan	Halte dan gapura penyeberangan yang dibangun	-	-	-	4 Halte	600.000.000	1 Halte	200.000.000	Seksi Prasarana jalan	Smd
			Peningkatan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Gedung kantor Dinas Perhubungan Terbangun	1 Gedung	-	-	1 Gedung	10.000.000.000	1 Gedung	10.000.000.000	Sekretaria	Smd
			Pembangunan dermaga Mahakam hilir	Gedung dermaga yang dibangun	1 Unit	1 Unit	-	1 Gedung	26.000.000.000	1 Gedung	26.000.000.000	Seksi prasarana Sungai	Smd
			<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas</b>	<b>Prosentase menurunnya angka kecelakaan</b>	<b>Prosentase</b>	<b>90.00</b>	<b>35.316.408.000</b>	<b>88.82</b>	<b>110.350.000.000</b>	<b>87.65</b>	<b>117.550.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	10 kali	10 kali	500.000.000	10 kali	250.000.000	10 kali	250.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengawasan dan pembinaan Lalu lintas jalan	Pengawasan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan	45 Kali	45 Kali	400.000.000	50 kali	1.000.000.000	55 kali	1.000.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai dalam wilayah hukum samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai mahakam dalam wilayah hukum samarinda	-	-	-	12 Kali	300.000.000	12 Kali	300.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalu lintas jalan dalam wilayah hukum samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalu lintas jalan dalam wilayah hukum samarinda	40 Kali	40 kali	-	40 kali	1.000.000.000	40 kali	1.000.000.000	Seksi Daltib	Smd
			Pengadaan marka jalan	Marka jalan terpasang	m <sup>2</sup>	-	-	9.300m <sup>2</sup>	800.000.000	10.000m <sup>2</sup>	800.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu – rambu lalu lintas sungai	Rambu – rambu lalu lintas sungai terpasang	-	-	-	200 buah rambu	400.000.000	200 buah rambu	400.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan rambu – rambu lalu lintas	Rambu – rambu jalan terpasang	100 buah	300 rambu lalu lintas	1.000.000.000	-	-	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas jalan	Rambu – rambu lalu lintas jalan terpasang	100 buah	-	-	200 Buah rambu	3.000.000.000	200 buah rambu	3.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS)	Zona Selamat Sekolah terpasang	3 titik	14 titik	500.000.000	16 titik	500.000.000	18 titik	500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Laporan pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	466.408.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di dermaga dan pelabuhan	sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di dermaga dan pelabuhan	-	-	-	1 set	150.000.000	1 set	150.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penertiban Parkir Kota Samarinda	100 Titik	100 titik	1.000.000.000	100 titik	2.000.000.000	100 titik	2.000.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	Penataan parkir kota samarinda	100 Titik	-	-	270 titik	250.000.000	270 titik	250.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Peningkatan pelayanan perparkiran	Peningkatan pelayanan perparkiran	100 Titik	100 Titik	1.000.000.000	100 Titik	2.500.000.000	100 Titik	2.500.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu PJU LED Smart System	Jaringan smart system LPJU	4 Lokasi Jaringan	-	-	4 Lokasi Jaringan	15.000.000.000	3 Lokasi Jaringan	15.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan PJU LED di Jembatan-jembatan Kota Samarinda	Lampu PJU LED di jembatan – kota samarinda	2 Lokasi Jaringan	-	-	2 Lokasi Jaringan	7.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	8.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Lampu LED di jalan Protokol	2 Lokasi Jaringan	2 Lokasi Jaringan	10.200.000.000	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Revitalisasi Jaringan dan KWh meter untuk efisiensi tagihan pajak PJU	Efisiensi jaringan dan KWh meter PJU	20 Lokasi Jaringan	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan traffic light dan area traffic control system (ATCS)	Traffic light dan area traffic control system (ATCS)	34 Titik	2 Titik	1.500.000.000	3 Titik	1.000.000.000	3 Titik	1.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda	LPJU di kota Samarinda	5 Titik	5 Titik lokasi	15.000.000.000	4 Titik	15.000.000.000	4 Titik	15.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penumpukan simpang jalan	Arus lalin lancar	-	-	-	4 Titik	10.000.000.000	4 Titik	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu penndahulu petunjuk jalan (RPPJ)	rambu penndahulu petunjuk jalan (RPPJ)	100 Buah	-	-	100 Buah	200.000.000	100 Buah	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan	papan nama jalan terpasang	100 Buah	-	-	100 Buah	200.000.000	100 Buah	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pemeliharaan marka jalan dalam kota Samarinda (Bankeu)	marka jalan dalam kota Samarinda terpasang	3000 m	-	3.000.000.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			Study kajian ruas jalan (Bankeu)	Dokumen kajian ruas jalan	-	-	-	1 Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd
			Pengadaan lampu penerangan jalan umum dalam kota Samarinda (Bankeu)	LPJU terpasang	-	5 Titik	10.000.000.000	5 Titik	10.000.000.000	5 Titik	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penambahan koneksi jaringan fiber optic pada ATCS (Bankeu)	Koneksi jaringan fiber optic pada ATCS	2 Jaringan	2 jaringan	600.000.000	2 Jaringan	600.000.000	2 Jaringan	600.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan traffic light (Bankeu)	traffic light terpasang	34 Titik	4 titik	10.000.000.000	4 Titik	2.000.000.000	4 Titik	2.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pembangunan tratoar line (Bakeu)	tratoar line tersedia	-	-	-	1 Titik	1.000.000.000	1 Titik	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu jalan (Bankeu)	rambu - rambu lalulintas jalan terpasang	100 unit	100 unit	450.000.000	100 Unit	400.000.000	100 Unit	400.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penumpukan simpang jalan (Bankeu)	Arus lalu lintas lancar	-	1 Titik	10.000.000.000	1 Titik	15.000.000.000	1 Titik	20.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Prosentase kendaraan bermotor yang diuji</b>	<b>90.00</b>	<b>97.11</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>99.11</b>	<b>5.300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.300.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor	fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor yang ditingkatkan	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	12 Bulan	5.000.000.000	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	alat uji kendaraan bermotor tersedia	1 paket	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	uji petik kendaraan bermotor	10 kali	10 kali	300.000.000	10 kali	400.000.000	10 kali	500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah terwujud untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang diluangkan kedalam rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Samarinda membuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
1. Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>8.065.078.000</b>	<b>100 %</b>	<b>29.871.963.400</b>	<b>100 %</b>	<b>21.128.024.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	16 Rekening	11112 rekening	653.024.000	11112 rekening	21.128.024.000	11112 Rekening	21.212.024.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
	2. Meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib lancar, aman dan nyaman		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	5 jenis	5 jenis	22.500.000	5 jenis	11.250.000	5 jenis	11.250.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	4 dokumen	256.500.000	4 dokumen	188.250.000	4 dokumen	229.700.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	3.393.000	12 jenis	4.196.500	12 jenis	4.196.500	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perhubungan		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	-	2 jenis	131.900.000	2 jenis	36.200.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Presentase rapat koordiasinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	100 %	100 %	300.000.000	100%	250.000.000	100%	225.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	396 orang	396 orang	7.185.410.000	396 orang	7.235.410.000	396 orang	7.697.210.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>966.493.756</b>	<b>100 %</b>	<b>746.433.000</b>	<b>100 %</b>	<b>702.103.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	100 %	67.500.000	100 %	154.370.000	100 %	33.750.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	100 %	823.993.750	100 %	554.563.000	100 %	630.853.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihar	100 %	100 %	75.000.006	100 %	37.500.0000	100 %	37.500.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 %	-	-	-	-	100 %	372.040.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	-	-	550 orang	372.040.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP	60.00 %	60.00 %	-	60.10 %	310.000.000	63.39 %	75.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT(RKA&DPA), LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan Keuangan	8 Dokumen	-	-	8 Dokumen	310.000.000	8 Dokumen	75.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan	Prosentase ketersediaan dokumen Perhubungan	7,69 %	-	100.000.000	-	18.328.500.000	7,69 %	30.948.054.135	Dinas Perhubungan	Smd
			Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan, Kebijakan Perhubungan, Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru (bankeu prov. APBD 2016)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	25.00 %	9.750.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	25.00%	10.000.000.000	-	-	-	-	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru ( pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	50 %	12.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pembangunan BSB (PT. NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	100 %	5.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			BSB (Utang NCR) (ABT) (Bankeu Provinsi APBD – P Tahun 2017)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	100 %	5.000.000.000	-	-	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi kota Samarinda	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	25.00 %	-	-	-	-	1 Dokumen	864.084.000	Seksi lalu lintas jalan	Smd
			Pembuatan Detail Engineering Design Dermaga Mahakam Ilir	Dokumen DED Dermaga Mahakam ilir	-	-	-	-	-	1 Dokumen	347.750.500	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pembayaran utang NCR	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	72%	34.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
			Hutang NCR (ABT)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	90%	27.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
			Pembangunan bandara samarinda baru	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	25.00 %	-	-	-	-	90.00 %	24.000.000.000	Subbag umum & kepegawaian	Smd
				<b>Persentase ketersediaan prasarana fasilitas perhubungan</b>	<b>21.74</b>	-	-	-	-	<b>21.74 %</b>	<b>250.000.000</b>		<b>Smd</b>
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Dermaga yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	3 Dermaga	-	-	-	-	3 Dermaga	250.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>60,91</b>	<b>60,91</b>	<b>600.000.000</b>	<b>64,68</b>	<b>14.442.050.000</b>	<b>72,54</b>	<b>7.600.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penertiban parkir kota samarinda	100 titik	100 titik	100.000.000	-	-	-	-	Seksi Perparkiran	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS) terpelihara	34 titik/unit	34 unit/titik	500.000.000	34 unit/titik	2.580.000.000	34 unit/titik	2.475.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpelihara	12 Bulan	-	-	12 Bulan	2.580.000.000	12 Bulan	800.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Persentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan</b>	<b>48,34</b>	<b>48,34</b>	<b>861.663.000</b>	<b>48,64</b>	<b>12.734.128.000</b>	<b>52,11</b>	<b>7.695.300.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			UPT Terminal	Operasional UPT. Terminal	8 terminal	8 Terminal	150.000.000	-	-	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			UPT. Terminal (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	92.975.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			UPT. PKB (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	224.756.950	-	-	-	-	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			DAK Perhubungan (Realokasi DAK 2015)	Rambu – rambu lalu lintas jalan terpasang	100 buah	100 buah	25.417.000	100 buah	202.000	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			DAK Bidang transportasi (DAK Perhubungan 2016)	Rambu – rambu lalu lintas jalan terpasang	100 buah	100 buah	98.496.000	100 buah	548.000	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			UPT. Pengelolaan dan dermaga	Operasional UPT. Pengelolaan dan Dermaga	5 Dermaga	5 Dermaga	84.143.000	-	-	-	-	Seksi angkutan jalan	Smd
			Penataan kantong parkir tepian Mahakam segmen masjid raya – kantor pos pasar pagi (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	1 Lokasi	1 lokasi	222.857.850	-	-	-	-	Seksi perparkiran	Smd
			Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	5 Dermaga	-	-	5 Dermaga	100.000.000	5 Dermaga	450.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan bermotor yang di uji dan laik jalan	44.500 unit	-	-	44.500 unit	750.000.000	44.500 unit	743.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan dalam lomba wahana tata nugraha	1 penghargaan WTN	1 Penghargaan WTN	150.000.000	1 Penghargaan WTN	157.000.000	1 Penghargaan WTN	140.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Pengendalian, pengawasan dan operasional lalulintas angkutan sungai	30 Kali	-	-	30 kali	85.000.000	30 kali	125.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	30 Nahkoda	30 Nahkoda	100.000.000	40 Nahkoda	150.000.000	50 Nahkoda	700.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Pelaksanaan pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	-	-	-	-	5 awak kendaran dan 5 pelajar	75.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas</b>	<b>Prosentase menurunnya angka kecelakaan</b>	<b>Persentase</b>	<b>93,53</b>	<b>867.500.000</b>	<b>92,35</b>	<b>39.723.670.000</b>	<b>91,18</b>	<b>43.075.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan kota samarinda	10 kali	-	-	10 kali	85.000.000	10 kali	50.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	30 kali	30 kali	717.500.000	30 kali	715.000.000	40 kali	250.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda sebagai fasilitas pengendalian dan keselamatan lalulintas	m <sup>2</sup>	-	-	7.500m <sup>2</sup>	319.608.432	7.900m <sup>2</sup>	2.195.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Laporan pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	143.000.000	4 Dokumen	75.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali ATCS (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	160.403.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan rambu – rambu lalu lintas (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	667.029.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penataan parkir tepi jalan	100 Titik	0	0	100 titik	825.000.000	100 titik	960.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Iventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan khusus	Dokumen inventarisasi perusahaan dan armada angkutan khusus	-	-	1 dokumen	75.000.000	-	-	-	Seksi lalu lintas	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu LED PJU Smart System	Jaringan lampu LED PJU Smart system terpasang	-	-	2 Lokasi Jaringan	4.995.400.000	-	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan marka jalan	Marka jalan terpasang	3000 Meter	-	-	-	-	3000 m	2.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan	Papan nama jalan terpasang	150 Buah	-	-	-	-	201 buah	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu 60 cm	Rambu 60 cm terpasang	-	-	-	-	-	158 rambu	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			DAK Transportasi 2016	Rambu terpasang	-	-	-	-	-	100 rambu	548.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Lampu LED terpasang di jalan protokol	-	-	-	-	-	3 Lokasi Jaringan	6.454.665.598	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Presentase kendaraan bermotor yang diuji</b>	<b>90.00 %</b>	<b>90.00 %</b>	<b>750.000.000</b>	<b>99.59 %</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>95.77 %</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan fasilitas penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan HM. Ardans	gedung pengujian kendaraan bermotor tersedia	1 Gedung	12 bln	-	12 bln	384.725.000	12 bln	2.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			UPT. Pengujian kendaraan bermotor (PKB)	Kendaraan yang di uji dan laik jalan	1 Unit	40.000 unit	721.675.100	-	-	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Lanjutan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor jalan HM. Ardans Samarinda (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Gedung PKB	1 Unit	1 unit	648.489.500	-	-	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	10 kali	0	0	10 kali	200.000.000	-	-	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd

Lanjutan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019, 2020 & 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelayanan administrasi perkantoran	Presentase	100 %	8.779.463.700	100 %	34.322.000.000	100 %	37.140.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	1112 Rekening	11112 Rekening	21.213.000.000	11112 Rekening	23.000.000.000	11112 Rekening	24.000.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	5 jenis	15.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	60.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	193.260.000	4 Dokumen	230.000.000	4 Dokumen	250.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	2.500.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	10.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Snd
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	98.000.000	2 jenis	180.000.000	2 jenis	250.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	100 %	150.000.000	100 %	450.000.000	100 %	550.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTTB serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	396 orang	396 orang	8.299.490.700	396 orang	10.400.000.000	396 orang	12.000.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase penyediaan makanan dan minuman	100 %	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>717.353.000</b>	<b>100 %</b>	<b>940.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.130.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	100 %	45.000.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	100 %	630.853.000	100 %	700.000.000	100 %	800.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	100 %	41.500.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Presentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	100 %	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	627 orang	627 orang	450.000.000	627 Orang	500.000.000	627 Orang	600.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan</b>	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
			Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi	Jumlah peningkatan SDM dan peralatan pengelolaan Administrasi	-	10 orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai E valuasi SAKIP</b>	Nilai	64.00	100.000.000	65.00	500.000.000	65.40	500.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan keuangan	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	500.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
			<b>Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>Presentase ketersediaan prasana fasilitas perhubungan</b>	7.69 %	82.61	3.730.090.535	86.96	45.840.044.803	91.30	45.490.044.803	Bidang Prasarana	Smd
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana fasilitas jalan	Perangkat lunak sistem informasi Dinas Perhubungan kota Samarinda	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Program)	Smd
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi	Perangkat lunak sistem informasi Perhubungan	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Program)	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana galangan	Perangkat lunak system informasi sarana prasarana galangan	-	-	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pengadaan sistem informasi fasilitas keselamatan jalan	Sistem informasi fasilitas keselamatan jalan	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Peningkatan sarana dan prasarana dermaga	3 Dermaga	3 Dermaga	300.000.000	3 Dermaga	500.000.000	3 Dermaga	500.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Kendaraan Operasional (Mobil Derek, mobil crane hidrolik, mobil operasional, mobil oprasional pengawasan LPJU, mobil patroli Daltib, Mobil pengawasan parkir, dan Sepeda Motor)	2 Unit	15 Unit sepeda motor patroli Daltib, 1 Unit mobil ops. Pengawasan LPJU, 1 Unit mobil pengawasan parkir, 1 Unit mobil crane hidrolik truckg, 1 Unit mobil crane pick up	2.500.000.000	1 Unit Mobil Derek, 1 Unit Mobil Crane hidrolik, 4 Unit Patroli Daltib, 1 unit pengawasan parkir, 1 Unit mobil operasional, 4 unit sepeda motor	4.800.000.000	1 Unit Mobil Derek, 1 Unit Mobil Crane hidrolik, 4 Unit Patroli Daltib, 1 unit pengawasan parkir, 1 Unit mobil operasional, 4 unit sepeda motor	5.000.000.000	Subbag. Umum dan kepegawaian	Smd
				<b>Persentase ketersediaan dokumen perhubungan</b>	<b>12.50</b>	<b>18.75</b>		<b>25.00</b>		<b>31.25</b>			
			Survey galangan kapal dan TUKS batubara serta konsultasi kekementerian Perhubungan	Laporan hasil survey galang kapal dan TUKS batu bara	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Dokumen	150.000.000	Seksi Prasarana multimoda	Smd
			Pembuatan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL) gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen Amdal gedung kantor Dinas Perhubungan kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Umum dan kepegawaian)	Smd
			Perencanaan teknis DED pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen DED pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Sekretariat (Sub. Bag. Umum dan kepegawaian)	Smd





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembangunan bandara samarinda baru (pembayaran hutang pada pihak ketiga)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	80.090.535	-	-	-	-	Samarinda	Smd
			Pembangunan bandara samarinda (Bankeu Provinsi)	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	100 %	100 %	1.699.091.064	-	-	-	-	Dishub Provinsi	Smd
			SID alur pelayaran DLKP DLKR dermaga dan pelabuhan Samarinda	Dokumen DLKP DLKR dermaga dan pelabuhan Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID kolam dermaga Mahakam ilir	Dokumen SID kolam dermaga Mahakam ilir	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID kolam dermaga harapan baru	Dokumen SID dermaga harapan baru	-	-	-	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	800.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			DED Dermaga loa janan ilir	Dokumen DED dermaga loa janan ilir	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Kajian kinerja jalan	Dokumen kajian kinerja jalan	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			DED Dermaga harapan baru	Dokumen DED Dermaga harapan baru	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap II	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	1 Dokumen	1.000.000.000	-	-	-	-	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap III	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	-	-	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda Tahap IV	Dokumen masterplan transportasi kota Samarinda	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	Dokumen prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	-	-	-	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pendataan dan pengawasan keselamatan jalan	Laporan pendataan dan tersedianya data pengawasan keselamatan jalan	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembuatan masterplan pelabuhan & dermaga	Dokumen masterplan pelabuhan & dermaga	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Angkutan Sungai	Smd
			<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Prosentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai standar pelayanan minimal</b>	<b>60.91 %</b>	<b>81.61</b>	<b>7.950.000.000</b>	<b>87.03</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>90.19</b>	<b>4.650.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS) yang dipelihara	34 Titik	34 Titik	1.650.000.000	34 Titik	3.500.000.000	34 Titik	4.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terminal dalam kota yang terpelihara	-	1 Terminal	1.000.000.000	4 Terminal	3.000.000.000	4 Terminal	3.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyeberangan	Halte dan gapura penyeberangan yang direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	500.000.000	4 unit	500.000.000	4 unit	500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pemeliharaan dermaga dalam kota Samarinda (Bankeu)	Dermaga dalam kota Samarinda yang dipelihara	-	1 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pemeliharaan dermaga kota Samarinda	Dermaga dalam kota Samarinda yang dipelihara	-	5 Unit	500.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai	Kendaraan operasional sungai yang dipelihara	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000.000	12 Bulan	3.500.000.000	12 Bulan	3.500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Prosentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan</b>	<b>48.34</b>	<b>57.40</b>	<b>900.000.000</b>	<b>74.02</b>	<b>9.063.479.000</b>	<b>92.45</b>	<b>10.863.479.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	Terminal yang aman dan nyaman bagi penumpang pengguna terminal	-	-	150.000.000	5 Terminal	300.000.000	5 Terminal	300.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Dermaga	5 Dermaga	300.000.000	5 Dermaga	300.000.000	5 Dermaga	300.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan yang di uji dan laik jalan	44.500 unit	43.600	500.000.000	44.500	1.500.000.000	44.898	1.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
			Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAS dalam kota Samarinda	Laporan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAS dalam kota Samarinda	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan dalam lomba wahana tata nugraha	1 penghargaan WTN	-	-	Penghargaan WTN	200.000.000	Penghargaan WTN	200.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Pengendalian, pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan sungai	30 kali	30 kali	100.000.000	30 kali	200.000.000	30 kali	200.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
			Peningkatan Pelayanan publik pada Proses Perijinan Angkutan	Proses pelayanan perijinan terhadap angkutan kota/umum	1524 Armada dan 36 Taxi argo	1524 Armada dan 36 Taxi argo	100.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	500.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	500.000.000	Seksi Angkutan Jalan	Smd
			Pembentukan dewan maritime Samarinda	Dewan maritime Samarinda	-	-	-	1 Dewan	300.000.000	1 Dewan	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Pelaksanaan kampanye SAR keselamatan pelayaran sungai	70 Peserta	70 peserta	300.000.000	70 peserta	300.000.000	80 peserta	300.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
			Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota	Armada angkutan kota yang terdaftar dan diremajakan	-	-	-	100 Unit	500.000.000	100 Unit	500.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Studi penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Dokumen penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Sosialisasi standar pelayanan minimal angkutan umum	Pelaksanaan sosialisasi standar pelayanan minimal angkutan umum	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi angkutan jalan	Smd
			Peningkatan pelayanan proses perijinan galangan kapal dan TUKS Batu bara	Pelayanan proses perijinan galangan kapal dan TUKS	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pendataankolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Pendataan dan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pengadaan ponton apung	ponton apung	-	1 unit	1.200.000.000	1 Unit	1.200.000.000	1 Unit	1.200.000.000	Seksi prasarana Sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalulintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	-	-	-	100 Peserta	300.000.000	100 Peserta	300.000.000	Seksi keselamatan pelayaran	Smd
			Study penataan rute dan trayek serta tariff angkutan sungai dalam kota	Dokumen jaringan pelayanan angkutan sungai antar dermaga	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Seksi angkutan sungai	Smd
			Study penataan rute dan pengembangan transportasi sungai dalam kota	Dokumen rute dan trayek sungai dalam kota	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Seksi Multimoda	Smd
			Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Pelaksanaan pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	200.000.000	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	300.000.000	5 awak kendaran dan 5 pelajar pelopor	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
			Pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Laporan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	-	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Penunjangoperasional dewan maritim kota	Laporan Operasionalisasi Dewan Maritim	-	-	-	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Survei investigasi alur pelayaran sungai dan dermaga	Dokumen data alur pelayaran sungai dan dermaga	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
			SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan samarinda	Pelaksanaan SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan Samarinda	-	-	-	Segmen 4	300.000.000	Segmen 5	300.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
			Penertiban angkutan barang di samarinda	Pelaksanaan penertiban angkutan barang di Samarinda	-	-	-	115 Perusahaan angkutan barang	200.000.000	115 Perusahaan angkutan barang	200.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan Angkutan	Sosialisasi Tertib Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	4 sekolah	-	-	4 Sekolah	250.000.000	4 Sekolah	250.000.000	Seksi keselamatan Jalan	Smd
			Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan dan angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Seksi Angkutan Khusus	Smd
			Pendataan barang pokok dan barang penting sebagai penunjang data Tim pengendalian inflasi Daerah (TPID)	Dokumen pendataan barang pokok dan barang penting sebagai penunjang data Tim pengendalian inflasi daerah (TPID)	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi angkutan khusus	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan ponton apung dermaga batang aji samarinda seberang	Ponton apung	1 Unit	-	-	1 Unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran (Bankeu)	Alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran	-	-	-	500 Unit	500.000.000	500 Unit	500.000.000	Seksi keselamatan pelayaran	Smd
			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	<b>26.500.000.000</b>	<b>63.41</b>	<b>27.200.000.000</b>	<b>70.00</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Pembangunan halte angkutan kota	Halte angkutan kota yang di bangun	4 Halte	4 halte	500.000.000	4 halte	600.000.000	1 halte	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pembangunan halte dan gapura penyeberangan	Halte dan gapura penyeberangan yang dibangun	-	-	-	4 Halte	600.000.000	1 Halte	200.000.000	Seksi Prasarana jalan	Smd
			Peningkatan gedung kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Gedung kantor Dinas Perhubungan Terbangun	1 Gedung	-	-	1 Gedung	10.000.000.000	1 Gedung	10.000.000.000	Sekretaria	Smd
			Pembangunan dermaga Mahakam hilir	Gedung dermaga yang dibangun	1 Unit	1 Unit	-	1 Gedung	26.000.000.000	1 Gedung	26.000.000.000	Seksi prasarana Sungai	Smd
			<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas</b>	<b>Prosentase menurunnya angka kecelakaan</b>	<b>Prosentase</b>	<b>90.00</b>	<b>35.316.408.000</b>	<b>88.82</b>	<b>110.350.000.000</b>	<b>87.65</b>	<b>117.550.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	10 kali	10 kali	500.000.000	10 kali	250.000.000	10 kali	250.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengawasan dan pembinaan Lalu lintas jalan	Pengawasan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan	45 Kali	45 Kali	400.000.000	50 kali	1.000.000.000	55 kali	1.000.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai dalam wilayah hukum samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai mahakam dalam wilayah hukum samarinda	-	-	-	12 Kali	300.000.000	12 Kali	300.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum samarinda	Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum samarinda	40 Kali	40 kali	-	40 kali	1.000.000.000	40 kali	1.000.000.000	Seksi Daltib	Smd
			Pengadaan marka jalan	Marka jalan terpasang	m <sup>2</sup>	-	-	9.300m <sup>2</sup>	800.000.000	10.000m <sup>2</sup>	800.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu – rambu lalu lintas sungai	Rambu – rambu lalulintas sungai terpasang	-	-	-	200 buah rambu	400.000.000	200 buah rambu	400.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Pengadaan rambu – rambu lalulintas	Rambu – rambu jalan terpasang	100 buah	300 rambu lalu lintas	1.000.000.000	-	-	-	-	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas jalan	Rambu – rambu lalulintas jalan terpasang	100 buah	-	-	200 Buah rambu	3.000.000.000	200 buah rambu	3.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS)	Zona Selamat Sekolah terpasang	3 titik	14 titik	500.000.000	16 titik	500.000.000	18 titik	500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Laporan pengendalian lalulintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	466.408.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
			Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di dermaga dan pelabuhan	sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di dermaga dan pelabuhan	-	-	-	1 set	150.000.000	1 set	150.000.000	Seksi prasarana sungai	Smd
			Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Penertiban Parkir Kota Samarinda	100 Titik	100 titik	1.000.000.000	100 titik	2.000.000.000	100 titik	2.000.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	Penataan parkir kota samarinda	100 Titik	-	-	270 titik	250.000.000	270 titik	250.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Peningkatan pelayanan perparkiran	Peningkatan pelayanan perparkiran	100 Titik	100 Titik	1.000.000.000	100 Titik	2.500.000.000	100 Titik	2.500.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu PJU LED Smart System	Jaringan smart system LPJU	4 Lokasi Jaringan	-	-	4 Lokasi Jaringan	15.000.000.000	3 Lokasi Jaringan	15.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan Pemasangan PJU LED di Jembatan-jembatan Kota Samarinda	Lampu PJU LED di jembatan – kota samarinda	2 Lokasi Jaringan	-	-	2 Lokasi Jaringan	7.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	8.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Lampu LED di jalan Protokol	2 Lokasi Jaringan	2 Lokasi Jaringan	10.200.000.000	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Revitalisasi Jaringan dan KWh meter untuk efisiensi tagihan pajak PJU	Efisiensi jaringan dan KWh meter PJU	20 Lokasi Jaringan	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan traffic light dan area traffic control system (ATCS)	Traffic light dan area traffic control system (ATCS)	34 Titik	2 Titik	1.500.000.000	3 Titik	1.000.000.000	3 Titik	1.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda	LPJU di kota Samarinda	5 Titik	5 Titik lokasi	15.000.000.000	4 Titik	15.000.000.000	4 Titik	15.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penumpukan simpang jalan	Arus lalin lancar	-	-	-	4 Titik	10.000.000.000	4 Titik	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu penndahulu petunjuk jalan (RPPJ)	rambu penndahulu petunjuk jalan (RPPJ)	100 Buah	-	-	100 Buah	200.000.000	100 Buah	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan	papan nama jalan terpasang	100 Buah	-	-	100 Buah	200.000.000	100 Buah	200.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			Pemeliharaan marka jalan dalam kota Samarinda (Bankeu)	marka jalan dalam kota Samarinda terpasang	3000 m	-	3.000.000.000	-	-	-	-	Seksi prasarana jalan	Smd
			Study kajian ruas jalan (Bankeu)	Dokumen kajian ruas jalan	-	-	-	1 Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd
			Pengadaan lampu penerangan jalan umum dalam kota Samarinda (Bankeu)	LPJU terpasang	-	5 Titik	10.000.000.000	5 Titik	10.000.000.000	5 Titik	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Penambahan koneksi jaringan fiber optic pada ATCS (Bankeu)	Koneksi jaringan fiber optic pada ATCS	2 Jaringan	2 jaringan	600.000.000	2 Jaringan	600.000.000	2 Jaringan	600.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan traffic light (Bankeu)	traffic light terpasang	34 Titik	4 titik	10.000.000.000	4 Titik	2.000.000.000	4 Titik	2.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pembangunan tratoar line (Bakeu)	tratoar line tersedia	-	-	-	1 Titik	1.000.000.000	1 Titik	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
			Pengadaan dan pemasangan rambu jalan (Bankeu)	rambu - rambu lalulintas jalan terpasang	100 unit	100 unit	450.000.000	100 Unit	400.000.000	100 Unit	400.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penumpukan simpang jalan (Bankeu)	Arus lalu lintas lancar	-	1 Titik	10.000.000.000	1 Titik	15.000.000.000	1 Titik	20.000.000.000	Seksi prasarana jalan	Smd
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Prosentase kendaraan bermotor yang diuji</b>	<b>90.00</b>	<b>97.11</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>99.11</b>	<b>5.300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.300.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Smd</b>
			Peningkatan fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor	fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor yang ditingkatkan	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	12 Bulan	5.000.000.000	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	alat uji kendaraan bermotor tersedia	1 paket	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	Seksi pengujian kendaraan bermotor	Smd
			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	uji petik kendaraan bermotor	10 kali	10 kali	300.000.000	10 kali	400.000.000	10 kali	500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Walikota Samarinda beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan Kota Samarinda secara kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan gambaran dan mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama dari pada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu Dinas Perhubungan, yang digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan Perubahan RENSTRA. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara nyata.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Perhubungan sebagai indikator kinerja utama. Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Dinas Perhubungan mempunyai bidang urusan pada tabel 7.1 berikut :



**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	60,00	61,87	61,87	61,87	65,81	68,67	70,13	70,13
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39,00	39,37	39,37	39,37	39,44	39,50	39,57	39,57
3	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	58,00	59,05	59,05	60,00	60,95	61,90	62,86	62,86
4	Prosentase berkurangnya titik macet	100	100	80,00	72,00	68,00	60,00	56,00	56,00
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, quadrill, LPJU, dll) pada jalan Kabupaten/Kota	30,17	30,68	45,70	57,15	62,05	68,66	80,42	80,42



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Samarinda selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan *review* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016-2021, selama masa transisi saat Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda sedang dalam penyusunan, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan, administrator, pengawas, pelaksana dan seluruh karyawan/karyawati Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Perubahan Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kota Samarinda khususnya bidang Perhubungan.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Samarinda.